

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA
LINGKUNGAN SEBAGAI WUJUD PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN DINOYO KOTA MALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

ASTERYNA ANANDITA

0910310018



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2013

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Sebagai Wujud Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo Kota Malang”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Moch. Saleh Soeaidy, MA selaku Ketua Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Bapak Drs. Minto Hadi, M.Si selaku Anggota Dosen Pembimbing Skripsi.
4. Bapak Drs. Rustamaji selaku Kepala Lurah Dinoyo beserta seluruh staf dan aparatur kelurahan yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi.
5. Teman-teman angkatan 2009 Fakultas Ilmu Administrasi Publik yang selalu memberikan semangat dan dukungan penuh demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doa demi kelancaran dan terselesaikannya skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Mei 2013

Penulis.

ABSTRAKSI

Anandita, Asteryna, 2013. **Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Sebagai Wujud Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo Kota Malang**. Skripsi. Jurusan Ilmu Administrasi Publik. Pembimbing (1) Dr. Moch. Saleh Soeaidy, MA (2) Drs. Minto Hadi, M.Si. 120 hal+xi.

Pertumbuhan penduduk di Indonesia khususnya di Pulau Jawa mengalami peningkatan yang sangat signifikan tetapi tidak seimbang. Hal tersebut disebabkan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi tapi tidak didukung dengan sarana prasarana lingkungan yang memadai. Padahal dengan tersedianya sarana prasarana lingkungan yang memadai dapat meningkatkan kegiatan sosial ekonomi di masyarakat. Melihat adanya jumlah penduduk yang terus meningkat tersebut maka pemerintah khususnya di Kota Malang membuat suatu program untuk memperbaiki lingkungan di sekitar perkampungan warga sehingga dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi warganya dengan Program Pemberdayaan Masyarakat. Penelitian skripsi ini dilakukan di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, penelitian ini sangat relevan dikaji lebih dalam dengan pokok permasalahan yang mengarah pada proses pembangunan sarana prasarana lingkungan dengan adanya Program Pemberdayaan Masyarakat, hasil yang dicapai dengan adanya Program Pemberdayaan Masyarakat dan juga faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo.

Berlatar pada perumusan masalah tersebut, tujuan yang diharapkan adalah untuk mengetahui proses pembangunan sarana prasarana lingkungan sebagai wujud pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat, untuk mengetahui hasil yang telah dicapai dari pembangunan sarana prasarana lingkungan sebagai wujud pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat, dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo Kota Malang.

Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang berarti memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat tentang pembangunan sarana prasarana lingkungan sebagai wujud Program Pemberdayaan Masyarakat untuk dapat diambil kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Sedangkan analisa yang dipakai dengan menggunakan metode interaktif diantara kegiatan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi secara berkelanjutan.

Hasil yang dapat ditemukan dalam penelitian ini pada pembangunan sarana prasarana lingkungan sebagai wujud pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat menunjukkan hasil yang telah dicapai selama proses pelaksanaannya, salah satunya dalam hal menambah pengetahuan dan pengalaman masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mengajarkan masyarakat akan pentingnya menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitarnya. Disisi lain juga memberikan manfaat berupa fasilitas/sarana prasarana yang memadai untuk

kegiatan sehari-hari warga dan pemberian upah kerja bagi warga yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Sehingga kesimpulan dari pembangunan sarana prasarana lingkungan sebagai wujud pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat sudah berjalan dengan baik, namun demikian masih perlu adanya kesinambungan yang harus ditingkatkan serta intensitasnya perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak yang terkait yaitu pemerintah daerah dan pihak Kelurahan Dinoyo sendiri. Dan apabila terdapat permasalahan mengenai pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dapat dicari pemecahannya. Maka dari itu, ada baiknya pembangunan sarana prasarana lingkungan sebagai wujud pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat perlu adanya kesinambungan atau berkelanjutan sehingga masyarakat dapat lebih lancar dan nyaman dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.



SUMMARY

Anandita, Asteryna, 2013. **Implementation of Environmental Infrastructure Development as a Form of Community Empowerment Program in Kelurahan Dinoyo Malang**. Thesis. Public Administration Department. Advisor (1) Dr. Moch. Saleh Soeaidy, MA (2) Drs. Minto Hadi, M.Si. Page 120+xi.

Population growth in Indonesia, especially in Java have a very significant improvement but it is not balanced. This is due to the very high population growth but not supported with adequate environmental infrastructure. But with the availability of adequate environmental infrastructure can improve the socio-economic activities in the community. See an increasing population, the Government especially in the city of Malang to make a program to improve the environment around the township residents so as to improve socio-economic conditions of their citizens with community empowerment Program. This thesis research done in Kelurahan Dinoyo District Lowokwaru Malang, this highly relevant research examined more deeply with the principal problems that lead to the construction of environmental infrastructure in the presence of Community Empowerment Program, the results achieved with Community Empowerment Programs and supporting factors as well as a barrier to the implementation of Community Empowerment Program in Kelurahan Dinoyo.

Set on the formulation of the problem, the expected goal is to figure out the process of the construction of environmental infrastructure as a form of implementation of Community Empowerment Program, to find out the results that have been achieved from the construction of environmental infrastructure as a form of implementation of Community Empowerment Program, and to know its support and restricting factors in the implementation of community empowerment Program in Kelurahan Dinoyo Malang.

As for the research methodology used is the method of qualitative research approach with the types of research descriptive meaning gives an overview in a systematic, factual and accurate on the construction of environmental infrastructure as a form of Community Empowerment Program to be drawn the conclusion that can be generalized. While the analysis by using interactive methods of presentation of data reduction, activity and withdrawal of conclusion/verification on an ongoing basis.

The results can be found in the study on the construction of environmental infrastructure as a form of implementation of Community Empowerment Program many giving benefits to the community, especially in terms of increased knowledge and experience of the community about the importance of safeguarding the environment and teach the community about the importance of establishing good relations with the surrounding community. On the other hand also provides benefits in the form of facilities/infrastructure is adequate for daily activities of citizens and the granting of wage employment for citizens who participated in the construction.

So the conclusion of the construction of environmental infrastructure as a form of implementation of Community Empowerment Program is already well

underway, but nevertheless still need for sustainability that should be increased and intensitasnya need to get attention from various stakeholders including local government and neighborhood parties Dinoyo himself. And when there are problems regarding the implementation of the Community Empowerment Program can look for the solution. Therefore, it is worth building the infrastructure environment as a form of implementation of Community Empowerment Program is need for sustainability or sustainable so that the public can more smoothly and comfortable in carrying out daily activities.



DAFTAR ISI

RINGKASAN	i
SUMMARY	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian	9
E. Sistematika Pemikiran	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan	12
1. Pengertian Administrasi Pembangunan	14
2. Ciri-ciri Administrasi Pembangunan	15
3. Pembangunan Daerah	15
B. Pembangunan Sarana dan Prasarana	17
1. Pengertian Sarana dan Prasarana	17
2. Tujuan Pembangunan Sarana dan Prasarana	19
3. Komponen sarana dan Prasarana	20
C. Program Pemberdayaan Masyarakat	22
1. Pengertian Program Pemberdayaan Masyarakat	22
2. Tujuan Program Pemberdayaan Masyarakat	24



3. Sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat	24
4. Asas Program Pemberdayaan Masyarakat	25
5. Prinsip Program Pemberdayaan Masyarakat	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	27
B. Fokus Penelitian	28
C. Lokasi dan Situs Penelitian	29
D. Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Instrumen Penelitian	33
G. Analisis Data	33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
a. Gambaran Umum Kota Malang	37
b. Penduduk	38
c. Letak Geografis	40
d. Wilayah Administratif	43
e. Visi dan Misi Kota Malang	43
2. Gambaran Umum Kelurahan Dinoyo	46
a. Luas dan Batas Wilayah	46
b. Kondisi Geografis	46
c. Struktur Pemerintahan Kelurahan Dinoyo	47
d. Potensi Kelurahan Dinoyo	48

B. Fokus Penelitian

1. Proses pembangunan sarana prasarana lingkungan sebagai wujud pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo Kota Malang	52
a. Tahap Sosialisasi	52

b. Tahap Perencanaan	54
c. Tahap Pelaksanaan	57
d. Tahap Pengawasan	59
2. Hasil yang telah dicapai dari pembangunan sarana prasarana lingkungan sebagai wujud pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo kota Malang	61
a. Pembangunan Pavingisasi	61
b. Pembangunan Gorong-gorong	80
3. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan sarana prasarana lingkungan sebagai wujud pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Dinoyo kota Malang	84
a. Faktor Pendukung	84
b. Faktor Penghambat	86

C. Analisis Data

1. Proses pembangunan sarana prasarana lingkungan sebagai wujud pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo Kota Malang	88
a. Tahap Sosialisasi	88
b. Tahap Perencanaan	92
c. Tahap Pelaksanaan	94
d. Tahap Pengawasan	96
2. Hasil yang telah dicapai dari pembangunan sarana prasarana lingkungan sebagai wujud pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo kota Malang.....	98
a. Pembangunan Pavingisasi	98
b. Pembangunan Gorong-gorong	109
3. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan sarana prasarana lingkungan sebagai wujud pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Dinoyo kota Malang	111
a. Faktor Pendukung	111
b. Faktor Penghambat	113

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 115

B. Saran 118

DAFTAR PUSTAKA 119

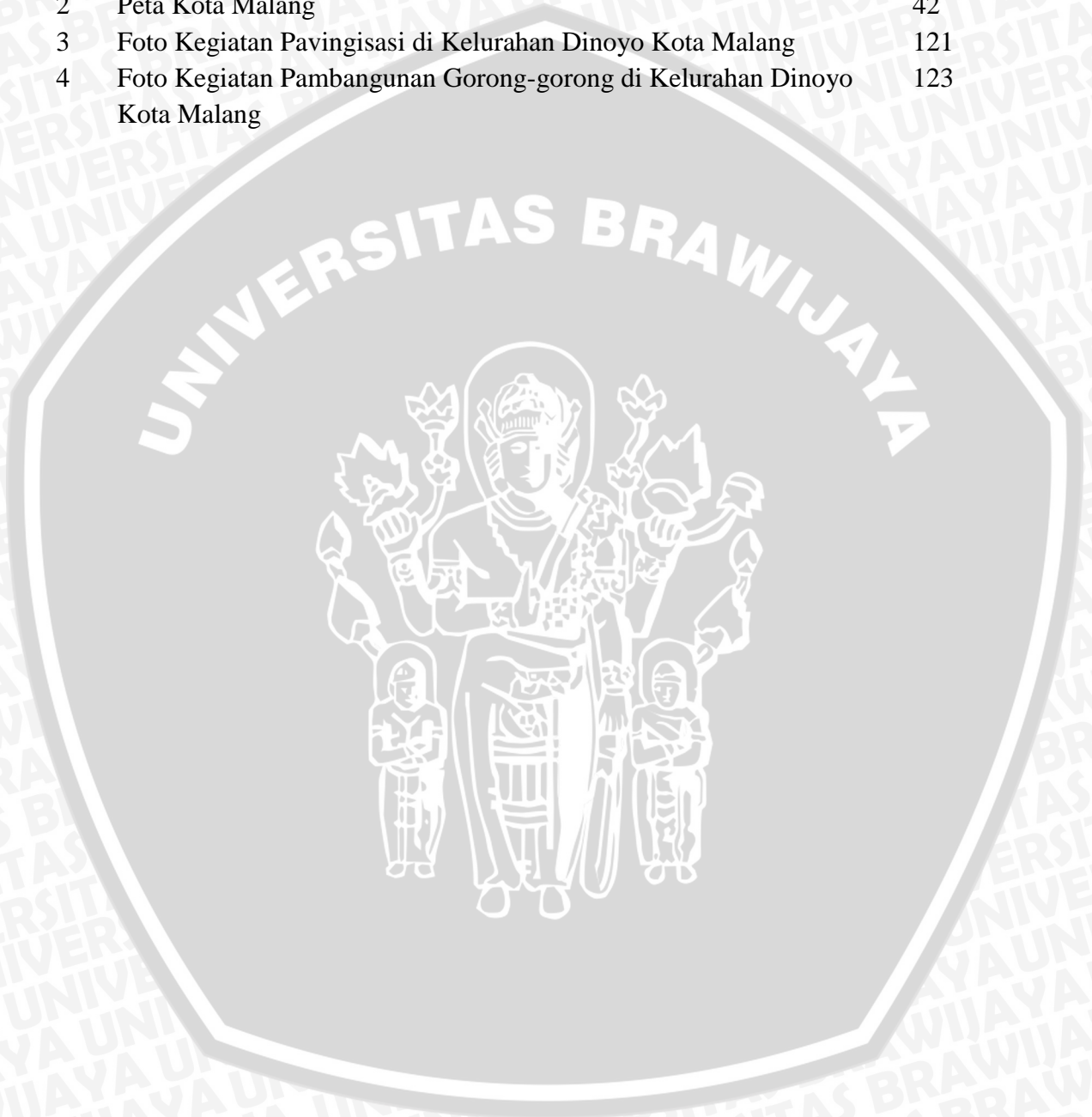


DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal.
1	Data Kependudukan Kota Malang Tahun 2011	39
2	Luas Kota Malang Tahun 2010	43
3	Jumlah Penduduk Kelurahan Dinoyo Tahun 2012	47
4	Daftar Hadir Warga Pada Rapat Musrenbangkel	55
5	Rincian Lokasi, Luas Wilayah Dan Biaya / Anggaran Dana Dalam Pavingisasi Di Kelurahan Dinoyo	62
6	Rincian Penggunaan Dana Anggaran Dan Upah Tenaga Kerja Pembangunan Pavingisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dinoyo	65
7	Rincian Penggunaan Dana Anggaran Dan Upah Tenaga Kerja Pembangunan Pavingisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dinoyo	67
8	Rincian Penggunaan Dana Anggaran Dan Upah Tenaga Kerja Pembangunan Pavingisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dinoyo	69
9	Rincian Penggunaan Dana Anggaran Dan Upah Tenaga Kerja Pembangunan Pavingisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dinoyo	71
10	Rincian Penggunaan Dana Anggaran Dan Upah Tenaga Kerja Pembangunan Pavingisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dinoyo	73
11	Rincian Penggunaan Dana Anggaran Dan Upah Tenaga Kerja Pembangunan Pavingisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dinoyo	75
12	Rincian Penggunaan Dana Anggaran Dan Upah Tenaga Kerja Pembangunan Pavingisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dinoyo	77
13	Rincian Penggunaan Dana Anggaran Dan Upah Tenaga Kerja Pembangunan Pavingisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dinoyo	79
14	Rincian Penggunaan Dana Anggaran Dan Upah Tenaga Kerja Pembangunan Gorong-Gorong Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dinoyo	81

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal.
1	Bagan Analisis Data Model Interaktif	34
2	Peta Kota Malang	42
3	Foto Kegiatan Pavingisasi di Kelurahan Dinoyo Kota Malang	121
4	Foto Kegiatan Pambangunan Gorong-gorong di Kelurahan Dinoyo Kota Malang	123



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur adalah pembangunan nasional yang menciptakan kemajuan-kemajuan di berbagai bidang kehidupan baik fisik, seperti kemajuan di bidang lingkungan, industri, penyediaan sarana dan prasarana, serta kemajuan-kemajuan di bidang non fisik, seperti keterampilan, pelatihan, dan sebagainya.

Pengertian pembangunan yang dikemukakan oleh Cokroamidjojo (1980: 59) yaitu:

“Pembangunan adalah suatu proses yang dinamis. Pembangunan adalah usaha ke arah tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Pembangunan juga merupakan proses tanpa akhir, suatu kontinuitas perjuangan untuk mewujudkan ide-ide, dan realitas yang akan terus berlangsung”.

Pembangunan merupakan hal wajib yang harus dilakukan oleh setiap bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dimana telah terjadi pergeseran paradigma dalam sistem penyelenggaraan pemerintah yaitu dari pola desentralisasi berupa pemberian otonomi kepada daerah. Pelaksanaan UU No. 32 tahun 2004 menganut prinsip :

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta potensi, dan keanekaragaman daerah.
2. Harus lebih meningkatkan kemandirian daerah.
3. Didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.
4. Harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga terjamin hubungan yang serasi antara pemerintahan pusat dan daerah serta antar daerah.

Berdasarkan prinsip tersebut, paradigma peran pemerintah bergeser dan berubah yaitu dari pelaksana menjadi fasilitator, dari pemberi instruksi menjadi melayani masyarakat, dan dari mengatur menjadi memberdayakan masyarakat.

Pada tahun 1999/2000 seluruh penduduk perkotaan di Indonesia diperkirakan mencapai 40% dari total 200 juta penduduk Indonesia atau sekitar 80 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk di Indonesia terjadi peningkatan sekitar 2,5-3,5% pertahun atau sekitar dua kali lebih cepat dari pertumbuhan penduduk secara total. Dalam kurun waktu 20 tahun penduduk kota di Indonesia diperkirakan akan bertambah lebih dari 100% dari 80 juta menjadi lebih dari 170 juta, sedangkan penduduk total hanya bertambah kurang dari 30% (dalam kurun waktu yang sama). Kalau pertumbuhan penduduk total secara keseluruhan akan menurun, maka sampai tahun 2015 pertumbuhan penduduk perkotaan malah semakin cepat (datastatistik-indonesia.com).

Pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia memang tidak seimbang. Kota-kota di Jawa menunjukkan peningkatan penduduk yang signifikan dibandingkan dengan kota-kota di pulau-pulau lainnya. Sampai tahun 2000 separuh lebih penduduk perkotaan berada di Pulau Jawa, padahal luas Pulau Jawa hanya 7% dari luas seluruh pulau di Indonesia (Kodoatie, 2005:24).

Penyediaan sarana dan prasarana dasar bagi suatu kota di Indonesia pada umumnya hampir selalu tertinggal dibandingkan dengan kecepatan laju pertumbuhan penduduk. Menurut Batubara (dalam Budiharjo, 1992:91–94), padatnya penduduk di kota akan mengakibatkan semakin kurang memadainya sarana dan prasarana lingkungan. Padahal sarana dan prasarana lingkungan merupakan kebutuhan dasar dan merupakan faktor penting dalam peningkatan stabilitas sosial, dinamika dan produktifitas masyarakat.

Menurut Jayadinata (1999:31) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dapat meningkatkan kegiatan sosial ekonomi, dan dengan kondisi sosial ekonomi yang baik masyarakat lebih memiliki kemampuan berpartisipasi dalam penyediaan prasarana di lingkungannya. Namun pada kenyataannya kemampuan pemerintah dalam menyediakan prasarana terbatas, sedang partisipasi masyarakat tidak muncul dengan sendirinya, perlu terus-menerus didorong melalui suatu komunikasi pembangunan.

Model pembangunan yang partisipatif mengutamakan pembangunan yang dilakukan dan dikelola langsung oleh masyarakat lokal. Model yang demikian itu menekankan pada upaya pengembangan kapasitas masyarakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat (Sumodiningrat, 1999:223). Berdasarkan model pembangunan tersebut, dapat dikemukakan bahwa suatu proyek atau program dapat digolongkan ke dalam model pembangunan partisipatif apabila program tersebut dikelola sendiri oleh masyarakat yang bersangkutan, dan dibantu oleh aparat pemerintah. Pemberian kewenangan kepada masyarakat setempat yang tidak hanya untuk menyelenggarakan proyek/program pembangunan, tetapi juga

untuk mengelola proyek tersebut akan mendorong masyarakat untuk mengerahkan segala kemampuan dan potensinya demi keberhasilan proyek/program tersebut. Pada gilirannya keberdayaan masyarakat setempat menjadi baik sebagai akibat dari meningkatnya kemampuan dan kapasitas masyarakat.

Penguatan kelembagaan di sini tidak hanya berarti penguatan secara fisik saja, seperti bangunan, struktur, atau hanya kelengkapan organisasi, tetapi lebih kepada penguatan fungsi dan perannya sebagai lembaga/organisasi yang diserahi tugas dan wewenang melaksanakan, memantau, atau menjaga program pembangunan di wilayahnya (Sumodiningrat, 1999:223). Dengan menguatnya kelembagaan masyarakat setempat terutama berkaitan dengan fungsi dan peran sebagai lembaga masyarakat yang diterima dan dipercaya oleh warga masyarakatnya, jika program pembangunan diserahkan pelaksanaannya kepada lembaga tersebut, maka partisipasi masyarakat untuk mensukseskan program tersebut dapat dijamin tergolong tinggi. Partisipasi masyarakat akan terjadi apabila pelaku atau pelaksana program pembangunan di daerahnya adalah orang-orang, organisasi, atau lembaga yang telah mereka percaya integritasnya, serta apabila program tersebut dapat menyentuh apa yang mereka rasakan dan dapat memberikan manfaat terhadap kesejahteraannya. Namun diperlukan kemampuan pemerintah untuk menetapkan sektor-sektor yang dapat diserahkan pembangunan dan pengelolaannya kepada masyarakat, serta bantuan perangsang yang harus diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu untuk menumbuhkembangkan partisipasi dalam pembangunan yang memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat, perlu dipikirkan tipe-tipe fasilitas tertentu yang bukan saja mampu

meningkatkan partisipasi itu sendiri tetapi juga mampu meningkatkan kemadirian masyarakat (Sukarjo,2006: 2).

Program Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkotaan. Pendekatan yang digunakan dalam program ini adalah pendekatan pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Program Pemberdayaan Masyarakat merupakan sistem dan pola proses perubahan yang dikehendaki dan direncanakan secara konseptual untuk memberdayakan masyarakat, mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat baik fisik maupun non fisik, melalui lembaga kemasyarakatan seperti LPMK dan BKM. Pada program ini bantuan diberikan untuk pembinaan di tiga aspek kehidupan masyarakat atau Program Tribina, yaitu Bina Sosial, Bina Sosial Ekonomi, dan Bina fisik Lingkungan.

Beragam jenis kegiatan telah dilakukan melalui Program Bina Sosial Pemberdayaan Masyarakat, antara lain penguatan kelembagaan dan pelatihan keterampilan dan kegiatan sosial. Untuk program bina ekonomi dititikberatkan pada kegiatan industri, perdagangan dan jasa. Kegiatan Bina Fisik lingkungan antara lain meliputi pembangunan jalan dan jembatan, sanitasi dan penyediaan sarana kebersihan dan lain-lain. (bapemas.jatimprov.go.id)

Begitu pula dengan pemerintah kota Malang, dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sejak tahun 2012

telah menyelenggarakan Program Pemberdayaan Masyarakat dengan sasaran utamanya adalah masyarakat Kelurahan di kota Malang. Dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan prakarsa dan swadaya masyarakat kota untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah kota dan menjalin hubungan yang harmonis antar masyarakat dengan pemerintah daerah.

Menurut Perda Kota Malang No. 13 tahun 2010 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Program Pemberdayaan Masyarakat diberikan dengan maksud untuk meningkatkan peran serta masyarakat setempat dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya. Kondisi ini pada akhirnya akan menimbulkan rasa saling memiliki di dalam diri masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan, sehingga masyarakat akan merawat dan memanfaatkan secara maksimal apa yang sudah dilaksanakan. Perjalanan Program Pemberdayaan Masyarakat kota Malang sejak awal tahun 2012 sampai sekarang telah melalui beberapa kemajuan maupun hambatan-hambatan dalam perjalanannya.

Kelurahan Dinoyo sebagai salah satu kelurahan yang ikut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat memiliki dinamika masyarakat yang sangat majemuk. Hal ini terbukti bahwa kelurahan Dinoyo dikelilingi oleh beberapa sekolah, perguruan tinggi baik Negeri maupun Swasta, rumas sakit, serta menjamurnya perumahan di wilayah kelurahan Dinoyo. Berdasarkan data yang didapat di kantor kelurahan Dinoyo dapat diketahui bahwa RW 01 sampai dengan RW 05 merupakan wilayah lama. Sedangkan RW 06 setengah wilayahnya masih penduduk perkampungan asli dan setengahnya lagi sudah dibangun menjadi

perumahan. Sedangkan RW 07 merupakan wilayah baru yang merupakan wilayah perumahan.

Dengan adanya pola pergerakan masyarakat yang majemuk tersebut, ketepatan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan menjadi suatu pemecahan masalah, hal ini dikarenakan dari 7 (tujuh) RW yang ada di wilayah kelurahan Dinoyo, RW 01 sampai dengan RW 05 dan setengah wilayah RW 06 penduduknya masih merupakan kawasan asli yang belum pernah mengalami pemugaran sehingga perlu diberikan bantuan berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan tempat tinggal mereka.

Menurut website Badan Pemberdayaan Masyarakat kabupaten Malang (<http://bpm.malangkab.go.id>), terdapat tujuan dan sasaran dari Pogram Pemberdayaan Masyarakat, yaitu:

1. Terwujudnya peningkatkan kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintahan Desa/ Kelurahan dan masyarakat melalui potensi dan sarana yang ada.
2. Terwujudnya pengembangan usaha ekonomi kerakyatan di sektor informal dengan mendayagunakan potensi ekonomi desa, peningkatan lembaga ekonomi dan stimulan dana pembangunan sebagai upaya pengentasan kemiskinan.
3. Terwujudnya pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) secara optimal dan Sumber Daya Desa melalui kerjasama antar lembaga.
4. Terwujudnya optimalisasi lembaga kemasyarakatan termasuk peran perempuan dalam upaya peningkatkan partisipasi masyarakat.
5. Terwujudnya Aparatur Pemerintahan Desa, kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan dalam pemberdayaan melalui manajemen perencanaan partisipatif serta pelayanan kepada masyarakat.
6. Terwujudnya peningkatkan kopetensi aparatur yang berdaya guna dan berhasil guna melalui budaya kerja yang disiplin dan profesional.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Sebagai Wujud Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo Kota Malang”**

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan pokok masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah proses pembangunan sarana prasarana lingkungan sebagai wujud pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Dinoyo Kota Malang?
2. Apa sajakah hasil yang telah dicapai dari pembangunan sarana prasarana lingkungan sebagai wujud pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo kota Malang?
3. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan sarana prasarana lingkungan sebagai wujud pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Dinoyo kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pembangunan sarana prasarana lingkungan sebagai wujud pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo kota Malang.
2. Untuk mengetahui hasil yang telah dicapai dari pembangunan sarana prasarana lingkungan sebagai wujud pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo kota Malang.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan sarana prasarana lingkungan sebagai wujud pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo kota Malang.

D. Kontribusi Penelitian

Ketika melakukan penelitian, diharapkan akan memberikan kontribusi yang bersifat positif. Adapun manfaat atau kontribusi yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Implikasi Teoritis
 - a) Bahan kajian dan membangun pemikiran dalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya studi tentang Program Pemberdayaan Masyarakat.
 - b) Sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti permasalahan yang sama.

- c) Sebagai bekal wawasan dan pengetahuan peneliti dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan belajar menganalisis permasalahan yang ada.

2. Secara Praktis

Bagi instansi Pemerintah khususnya Kelurahan diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang terkait dengan pembangunan sarana prasarana lingkungan sebagai wujud pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Dinoyo kota Malang.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penelitian ini yaitu:

BAB I : Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penelitian.

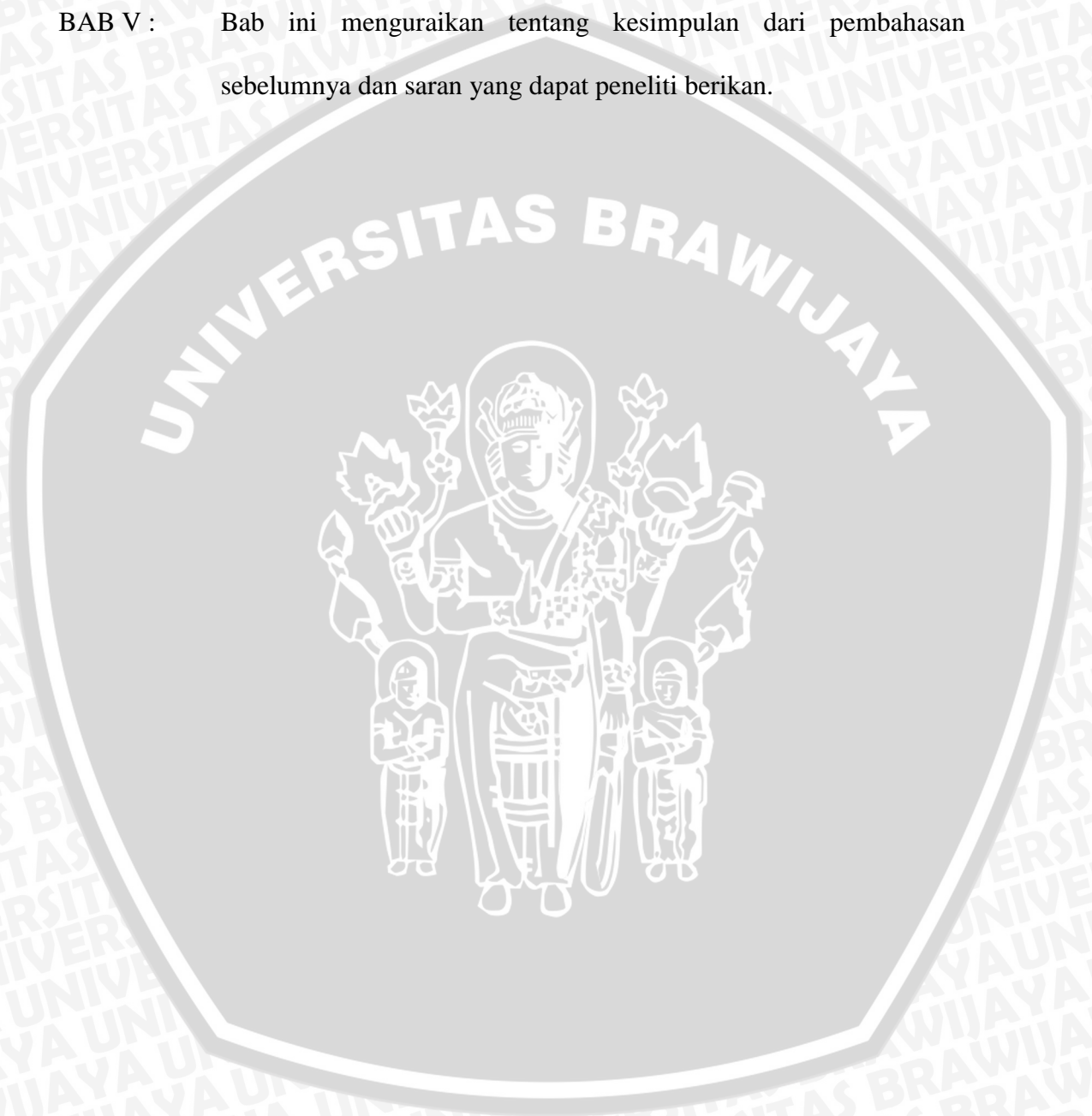
BAB II : Bab ini menguraikan tentang kajian pustaka yang berkaitan dengan pembangunan sarana prasarana lingkungan sebagai wujud pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.

BAB III : Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan pada penelitian yang terkait.

BAB IV : Bab ini menguraikan tentang data-data yang diperoleh selama penelitian berlangsung sesuai dengan fokus penelitian dan pembahasan mengenai pembangunan sarana prasarana lingkungan

sebagai wujud pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Dinoyo kota Malang.

BAB V : Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan saran yang dapat peneliti berikan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan

1. Pengertian Administrasi Pembangunan

Istilah administrasi pembangunan menurut Siagian (1985:2-3) meliputi dua pengertian, yaitu tentang administrasi dan pembangunan.

“Administrasi diartikan sebagai keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan pembangunan biasanya didefinisikan sebagai usaha atau rangkaian usaha usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).”

Dari pengertian administrasi dan pembangunan di atas, maka administrasi pembangunan dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh dua orang atau lebih sebagai usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Dari pengertian di atas maka Siagian (1985:3-4) menganalisis bahwa terdapat beberapa ide pokok yang perlu diperhatikan apabila berbicara tentang pembangunan, yaitu:

- a. Pembangunan merupakan suatu proses. Proses berarti suatu kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan; dimana proses tersebut terbagi menjadi tahap-tahap, yaitu berdasarkan jangka waktu, biaya atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.
- b. Pembangunan merupakan usaha secara sadar dilaksanakan.
- c. Pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan.
- d. Pembangunan mengarah pada modernitas. Modernitas diartikan sebagai cara hidup baru dan lebih baik dari sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka usaha peningkatan kemampuan swa-sembada dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain.
- e. Modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi-dimensionil. Artinya bahwa modernitas mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara, terutama aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan administrasi.
- f. Kesemua hal yang telah disebutkan di atas ditujukan kepada usaha membina bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Kegiatan pembangunan menyangkut mobilitasi sumber daya manusia, uang, fasilitas dan tindakan pemerintah serta mengalokasikannya dalam kombinasi yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan teknis dan mencapai sasaran-sasaran tertentu dalam pembangunan. Administrasi pembangunan dirasakan inovatif setelah menaruh perhatian serius pada perubahan sosial diantara sasaran pembangunan yang hendak dicapai. Dengan menaruh perhatian pada aspek sosial, dimana pada aspek sosial ini banyak terdapat masalah, diantaranya masalah kesenjangan, pengangguran, kemiskinan dan lain-lain, maka permasalahan yang dihadapi menjadi semakin luas.

2. Ciri-ciri Administrasi Pembangunan

Menurut Tjokroamidjojo (1991:9-10) mengemukakan bahwa setidaknya terdapat tujuh ciri yang ada dalam administrasi pembangunan. Ketujuh ciri tersebut adalah:

- a. Lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda terutama bagi lingkungan masyarakat negara-negara berkembang.
- b. Administrasi pembangunan mempunyai peran aktif dan berkepentingan (*committed*) terhadap tujuan-tujuan pembangunan baik dalam perumusan kebijakannya maupun pelaksanaannya yang efektif.
- c. Berorientasi kepada usaha-usaha yang mendorong perubahan-perubahan (inovasi) kearah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat dimasa yang akan datang.
- d. Lebih berorientasi kepada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan (*development function*) dari pemerintah.
- e. Administrasi pembangunan harus mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijakan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang.
- f. Dalam administrasi pembangunan, administrator dalam aparatur pemerintah juga bisa merupakan penggerak perubahan (*change agents*).
- g. Lebih berpendekan lingkungan (*ecological approach*), berorientasi pada kegiatan (action oriented), dan bersifat pemecahan masalah (*problem solving*).

Setelah melihat ciri-ciri administrasi pembangunan di atas, Tjokroamidjojo (1991, h.14) menggambarkan ruang lingkup administrasi pembangunan, yaitu: sebagai penyusun kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara (*the administration of development*) serta perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pembangunan di berbagai bidang serta pelaksanaannya secara efektif (*the administration of administration*).

Pembangunan yang dilakukan di negara-negara berkembang tersebut pada akhirnya melahirkan bermacam-macam paradigma, yaitu:

- a. Paradigma Pertumbuhan (*Growth Paradigm*)
Paradigma Pertumbuhan memfokuskan diri pada akumulasi kapital nasional, dengan produk Domestik Bruto (GNP: Growth National Product) sebagai ukuran keberhasilan.
- b. Paradigma Kesejahteraan (*Welfare Paradigm*)
Fokus dari strategi ini mengarah pada penyediaan atau penciptaan lapangan pekerjaan langsung bagi masyarakat sebagai alat untuk mendistribusikan pertumbuhan dan kesejahteraan yang dihasilkan mesin ekonomi nasional.
- c. Paradigma Pembangunan Manusia (*People Centered Development Paradigm*)
Paradigma ini memberikan peranan kepada individu sebagai pelaku yang menentukan hidup mereka. Oleh karena itu paradigma ini menekankan pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri.
- d. Paradigma Pemberdayaan Masyarakat (*Public Empowerment Paradigm*)
Dalam paradigma ini masyarakat dilibatkan secara menyeluruh mulai dari pembuatan keputusan sampai dengan pelaksanaan pembangunan. Paradigma ini terfokus pada penguatan kemampuan masyarakat terutama masyarakat miskin untuk dapat mengatasi atau memenuhi kebutuhan mereka melalui pengelolaan aset-aset yang ada pada masyarakat.

3. Pembangunan Daerah

Istilah pembangunan daerah bermakna sangat kompleks sehingga terdapat banyak pengertian yang berkaitan dengannya. Pada awalnya, istilah ini bermakna kegiatan yang ditujukan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah (propinsi, kabupaten, atau kota). Namun pengertian ini dianggap memiliki beberapa kelemahan karena belum mengaitkan antara pembangunan daerah dengan perkembangan penduduk. Konsep yang lahir kemudian adalah konsep pembangunan daerah yang lebih menekankan pada aspek peningkatan pendapatan perkapita. Ini berarti bahwa pembangunan daerah harus menekankan pada aspek kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan hasil (*output*) yang melebihi tingkat pertumbuhan penduduk.

Konsep inipun mengalami nasib serupa karena dianggap terlalu economic centrist. Beberapa konsep pembangunan daerah yang economic centris tersebut menghasilkan konsep pembangunan daerah yang multidimensional. Meskipun terdapat beragam corak pemikiran, namun konsep pembangunan daerah yang multidimensional tadi menghendaki adanya cakupan yang lebih luas seperti menurut Nugroho (2007:62) sebagai berikut :

- a. *Life sustenance*, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, kesehatan) bukan untuk to be more tetapi untuk mempertahankan hidup.
- b. *Self esteem*, pembangunan daerah harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai manusia.
- c. *Liberation*, kebebasan setiap insan untuk berkembang (jiwa dan raga) dan ikut serta dalam kegiatan pembangunan daerah.

Jika dalam pengertian yang pertama tentang pembangunan daerah kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh siapapun, tanpa harus ada partisipasi maka pada pengertian yang kedua tersebut harus dilakukan secara kemitraan, harus ada penciptaan lapangan pekerjaan. Disamping itu, juga harus meningkatkan dan menggairahkan ekonomi daerah. Apabila dalam pengertian pertama kurang memperhatikan kekhasan suatu daerah, penggunaan sumber daya lokal dan inisiatif lokal, pada pengertian yang terakhir justru sebaliknya. Pembentukan dan penguatan intuisi lokal, perbaikan kapasitas tenaga kerja, dan lain-lain menjadi perhatian pertama dari konsep pembangunan daerah yang lebih belakangan. Dengan kata lain, konsep yang terakhir menekankan pada kualitas sumber daya lokal, peluang kerja untuk masyarakat, serta inisiatif dan partisipasi serta kemitraan antara unsur yang ada.

B. Pembangunan Sarana dan Prasarana

1. Pengertian Sarana dan Prasarana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:880), sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana atau yang sering disebut infrastruktur (Jayadinata: 1992) adalah merupakan suatu faktor potensial yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah, karena pembangunan tidak akan sukses dan berjalan dengan baik tanpa dukungan prasarana yang memadai.

Secara teknis, kabupaten dan kota mempunyai level yang sama dalam pemerintahan. baik kota maupun kabupaten, secara tipikal harus menangani enam sektor perkotaan yang saling berhubungan, yaitu pertanahan, lingkungan, infrastruktur, perumahan, fasilitas sosial dan pembangunan ekonomi. (Nurmandi,1999:98).

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, yang didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Kodoatie,2003:9).

Apabila fasilitas infrastruktur sudah dibangun lebih dahulu sebelum benar-benar dibutuhkan, dan perluasan serta penyambungan pelayanan umum sudah terjamin sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka pola perkembangan masyarakat dapat dikendalikan secara efektif (Stein dalam Catanese,1992:318).

Infrastruktur atau prasarana dan sarana diartikan sebagai fasilitas fisik suatu kota atau negara yang disebut pekerjaan umum (Grigg dalam Suripin,2004:1). Menurut UU No.4 th 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, prasarana diartikan sebagai kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan, kawasan, kota atau wilayah (*spatial space*) sehingga memungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya sedangkan komponen-komponennya adalah jalan, air bersih, pembuangan sampah, drainase, sanitasi, listrik dan telepon. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya.

Infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Kodoatie,2003:9). Sektor infrastruktur mencakup air bersih, jalan/jembatan, fasilitas komunikasi serta fasilitas sanitasi dan sampah.(Nurmandi,1999:98).

Oleh Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, prasarana dan sarana didefinisikan sebagai bangunan dasar yang sangat diperlukan untuk mendukung kehidupan manusia yang hidup bersama-sama dalam suatu ruang yang terbatas agar manusia dapat bermukim dengan nyaman dan dapat bergerak dengan mudah dalam segala waktu dan cuaca, sehingga dapat hidup dengan sehat dapat berinteraksi satu dengan lainnya dalam mempertahankan kehidupannya. (Suripin,2004:2)

Pengelolaan sistem infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan mempunyai beberapa dimensi yang harus diintegrasikan ke semua aspek pembangunannya, salah satunya *political sustainability*, link birokrasi (pemerintah) dan masyarakat. Para pemimpin formal dan informal untuk suatu sector tertentu dalam masyarakat local harus mampu menjalin komunikasi dengan struktur-struktur politik dan birokrasi (Kodoatie,2003:173).

Kualitas infrastruktur suatu negara berbanding lurus dengan tingkat perekonomian negara tersebut. Semakin maju suatu negara, semakin besar pula kemampuan pemerintah membangun infrastruktur dengan dana sendiri (Kompas dalam Kodoatie,2003:14)

2. Tujuan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kota sebagai suatu permukiman yang relatif besar, padat dan permanen dengan penduduknya yang heterogen kedudukan sosialnya sebagai permukiman identik dengan kumpulan dari perumahan yang luas dengan berbagai fasilitas lingkungan didalamnya (Daldjoeni, 1997:29). Beragamnya dinamika dan kegiatan masyarakat perkotaan, menurut Rukmana (1993:7) membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang memadai agar tercipta suatu lingkungan yang mampu memberikan kenyamanan dan kemudahan-kemudahan bagi masyarakatnya dalam menjalani kegiatan hidupnya. Senada dengan hal tersebut Djoko Sujarto (2005) menyatakan bahwa pembangunan perkotaan perlu ditingkatkan dan diselenggarakan secara berencana dan terpadu dengan memperhatikan rencana umum tata ruang, pertumbuhan penduduk, lingkungan permukiman, lingkungan

usaha dan lingkungan kerja, serta kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial lainnya agar terwujud pengelolaan perkotaan yang efisien dan tercipta lingkungan sehat, rapi, aman dan nyaman. Perhatian khusus perlu diberikan pada peningkatan sarana dan prasarana umum yang layak.

Komarudin (1997:92) menyatakan bahwa tujuan pembangunan prasarana permukiman adalah:

- a. Meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan, harkat, derajat dan martabat masyarakat penghuni permukiman yang sehat dan teratur.
- b. Mewujudkan kawasan kota yang ditata secara lebih baik sesuai dengan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang kota yang bersangkutan.
- c. Mendorong penggunaan tanah yang lebih efisien dengan pembangunan rumah susun, meningkatkan tertib bangunan, memudahkan penyediaan prasarana dan fasilitas lingkungan permukiman yang diperlukan serta mengurangi kesenjangan kesejahteraan penghuni dari berbagai kawasan di daerah perkotaan.

Tujuan pembangunan sarana dan prasarana dari pengertian diatas pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam bermasyarakat dengan memanfaatkan prasarana yang ada secara optimal sesuai dengan fungsinya.

3. Komponen Sarana dan Prasarana

Budiharjo, 1993 menyatakan bahwa yang sering terabaikan padahal sangat penting artinya bagi kelayakan hidup manusia penghuni lingkungan perumahan adalah sarana dan prasarana, yang meliputi:

- a. Pelayanan Sosial (*social services*), seperti sekolah, klinik, puskesmas, rumah sakit yang pada umumnya disediakan oleh pemerintah.
- b. Fasilitas Sosial (*social facilities*), seperti tempat peribadatan, persemayaman, gedung pertemuan, lapangan olahraga, tempat

bermain/ruang terbuka, pertokoan, pasar, warung, kakilima dan sebagainya.

- c. Prasarana lingkungan meliputi jalan dan jembatan, air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air kotor dan persampahan.

Prasarana dasar sendiri menurut Dirjen Cipta Karya meliputi jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan saluran pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah untuk kesehatan lingkungan serta jaringan saluran air hujan untuk drainase dan pencegahan banjir. Senada dengan tersebut diatas Grigg menyatakan bahwa infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Departemen Pekerjaan Umum didalam Pedoman Penyusunan Rencana Fasilitas Pelayanan Masyarakat Permukiman Kota menyatakan bahwa prasarana dasar perkotaan adalah merupakan suatu fasilitas pelayanan prasarana lingkungan perumahan kota yang meliputi komponen: jalan lingkungan, jalan setapak, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah/sanitasi, drainase dan pengelolaan sampah rumah tangga yang dibangun untuk menjamin kondisi kesehatan serta meningkatkan sosial dan perekonomian masyarakat. Sejalan dengan tersebut diatas menurut *Organisation for Economic Cooperation and Development* (1991:19) menyatakan bahwa prasarana kota meliputi penyediaan air dan fasilitas limbah, drainase air permukaan, jalan raya, fasilitas transportasi, jaringan distribusi energi, fasilitas telekomunikasi dan jaringan pelayanan lainnya. Dari komponen prasarana tersebut, prasarana yang benar-benar dikelola oleh masyarakat pada dasarnya hanya ada tiga komponen, yaitu:

- a. Prasarana jalan, yaitu jalan lokal sekunder tipe I dan tipe II. Jalan lokal sekunder tipe I merupakan jalan setapak di dalam permukiman yang berfungsi untuk pejalan kaki dengan lebar 1,5 meter. Sedangkan jalan lokal sekunder tipe II dengan lebar 3,5 meter berfungsi sebagai jalan kendaraan roda empat dan berada dilingkungan permukiman. Kedua jenis jalan tersebut pembangunan dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah.
- b. Prasarana drainase, yaitu saluran di sepanjang kiri kanan jalan yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan sehari-hari dan masyarakat memiliki kemampuan untuk mengoperasikan dan memeliharanya. Rendahnya kinerja saluran akan mengakibatkan genangan air yang berpengaruh langsung pada aktifitas masyarakat dan kondisi lingkungan.
- c. Prasarana pembuangan sampah, yaitu mulai dari pembuangan sampah pada tempat yang telah disediakan sampai pengumpulan di tempat pembuangan sementara yang ada pada lingkungan tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas maka komponen sarana dan prasarana permukiman pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 macam kelompok, yaitu:

- 1) Komponen yang memberikan input kepada penduduk, termasuk dalam kategori ini adalah komponen prasarana air bersih dan listrik.
- 2) Komponen yang mengambil output dari penduduk, termasuk dalam kelompok ini adalah prasarana drainase, pembuangan air kotor/ sanitasi dan pembuangan sampah.
- 3) Komponen yang dapat dipakai untuk memberi input maupun mengambil output, yaitu meliputi prasarana jalan dan telepon.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Program Pemberdayaan Masyarakat

Program Pemberdayaan Masyarakat ini merupakan dana bantuan langsung kepada masyarakat dengan menggunakan pendekatan Tribina sebagai model pendekatan dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat RW di kelurahan, yaitu meliputi Bina Sosial, Ekonomi dan Fisik Lingkungan. Alokasi dari ketiga pendekatan ini akan dilihat dari prioritas kebutuhan dasar masyarakat masing-masing RW di kelurahan melalui hasil identifikasi bersama-sama masyarakat dan

Fasilitator Kelurahan yang korelasinya terwujud dalam penggunaan dana bantuan langsung masyarakat

Bantuan kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk dana yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang diusulkan, dilaksanakan dan diawasi oleh masyarakat itu sendiri dengan pendampingan LPMK. Dana tersebut dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif, pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan serta pengembangan sumberdaya manusia dalam penguatan kelembagaan yang disalurkan kepada kelompok-kelompok Masyarakat (Pokmas) di RW-RW melalui organisasi kelembagaan masyarakat di masing-masing kelurahan dan Lurah berfungsi sebagai Penanggung Jawab.

Dalam mengelola keuangan Program Pemberdayaan Masyarakat, Dewan Kelurahan diharuskan mambagi anggaran dana yang akan dibagikan kepada setiap Pokmas menjadi 3 Termin / tahap. Pada Termin 1 pencairan dana dilakukan sebesar 40% dari anggaran, kemudian pada Termin 2 dilakukan pencairan sebesar 30% dan pada Termin 3 dicairkan sisa anggaran sebesar 30%.

Dana anggaran tersebut hanya dapat dicairkan oleh Kelompok Masyarakat atau Pokmas dengan countersign dari Dewan Kelurahan beserta Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK).

2. Tujuan Program Pemberdayaan Masyarakat

- a. Memberdayakan masyarakat yang berbasis di komunitas RW, mengatasi masalah yang ada dengan melaksanakan kegiatan yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui upaya perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan, pengembangan ekonomi produktif dan pembukaan lapangan kerja baru serta program sosial lainnya.
- c. Memanfaatkan institusi yang ada di masyarakat (Dewan Kelurahan), Kepengurusan RW, RT, BKM dan LPMK.
- d. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mengimbangi dan mensinerjikan program bantuan dari Pemerintah (Matching Fund).
- e. Menyiapkan kemampuan perorangan dan keluarga melalui upaya bersama berlandaskan kemitraan yang mampu mengembangkan usaha potensial yang bersifat produktif dengan berbasis pada kelompok usaha kecil dan menengah.

3. Sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat yang bermukim di RW-RW Kelurahan sasaran beserta institusi kemasyarakatan yang ada perlu diberdayakan, agar mampu mengidentifikasi permasalahan dan potensi masyarakat yang ada di RW/Kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan serta mampu menjawab permasalahan tersebut dengan pengelolaan kegiatan yang akuntabel, aspiratif, partisipatif dan transparan.

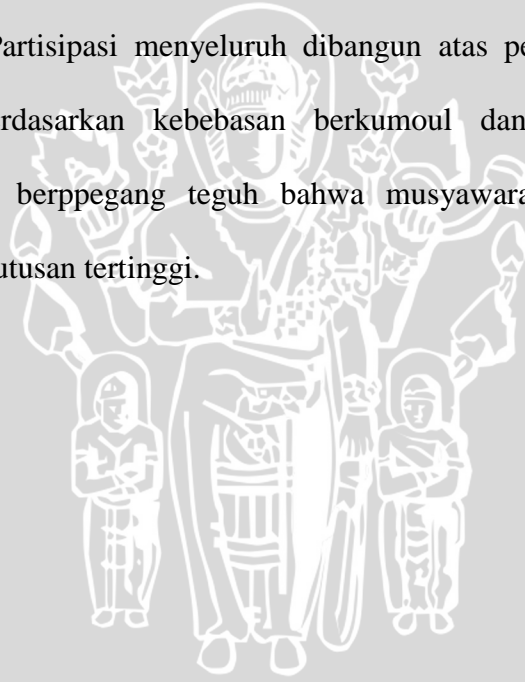
4. Asas Program Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Kemitraan : Menjalin kerjasama dari seluruh komponen masyarakat yang menunjang pemberdayaan masyarakat melalui berbagai bidang kegiatan.
- 2) Keadilan : Memberikan manfaat yang merata pada seluruh strata sosial kehidupan masyarakat tanpa membedakan suku, ras, dan agama.
- 3) Kesederhanaan : Proses kegiatan yang diselenggarakan untuk masyarakat hendaknya didasarkan pada prosedur dan langkah-langkah yang sederhana, mudah dipahami dalam hal ketentuan dan aturan baik secara administratif maupun secara teknis.
- 4) Kesetaraan gender : semua laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
- 5) Kejujuran : membuka hati nurani seluruh umat manusia yang terlibat langsung atau tidak langsung untuk mengangkat nilai-nilai positif dalam masyarakat.

5. Prinsip Program Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Desentralisasi : Memberikan kepercayaan kepada masyarakat dalam pengelolaan pembangunan wilayahnya melalui institusi lokal.
- 2) Akuntabilitas : Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara teknis maupun administratif.

- 3) Keberlanjutan : Hasil-hasil kegiatan dapat dilestarikan dan di tumbuhkan dikembangkan oleh masyarakat sendiri melalui wadah institusi masyarakat setempat yang mandiri dan profesional.
- 4) Keterbukaan : Semua kegiatan dari awal yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dari seluruh kegiatan dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan.
- 5) Partisipasi : Seluruh anggota masyarakat berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan seluruh kegiatan.
- 6) Demokrasi : Partisipasi menyeluruh dibangun atas persamaan hak dan kewajiban, berdasarkan kebebasan berkumouh dan mengungkapkan pendapat, dan berpegang teguh bahwa musyawarah sebagai forum pengambil keputusan tertinggi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan sarana untuk memahami permasalahan secara ilmiah. Suatu penelitian tentunya harus menggunakan metode yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti, agar memperoleh data yang dikehendaki dan relevan dengan permasalahan yang ada. Jenis dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moch. Nazir (1998: 63), metode penelitian yang bersifat deskriptif memberikan batasan sebagai berikut:

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu set pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan daripada penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki”.

Menurut Kurt dan Miller sebagaimana dikutip oleh Moleong (2000: 3), bahwa “penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan ruang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya”.

Dari uraian tersebut di atas maka sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni “Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Sebagai Wujud Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo

Kota Malang” maka peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif dalam mencari jawaban permasalahan dalam penelian.

B. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian secara jelas dan mantap akan mempermudah penulis membuat keputusan yang tepat data mana yang tidak perlu dijamah ataupun data mana yang pperlu dibuang atau dikeluarkan.

Menurut Moleong (2006: 94) ada 2 maksud penetapan dari fokus:

1. Penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri. Peneliti tidak perlu kesana kemari untuk mencari subyek penelitian, sudah dengan sendirinya dibatasi oleh fokusnya.
2. Penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan.

Adapun fokus dari penelitian ini yang berjudul Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Dinoyo Kota Malang ini adalah :

1. Proses pembangunan sarana prasarana lingkungan sebagai wujud pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo Kota Malang.
 - a. Tahap sosialisasi

- b. Tahap perencanaan
 - c. Tahap pelaksanaan
 - d. Tahap pengawasan dan pemeliharaan
2. Hasil yang telah dicapai dari pembangunan sarana prasarana lingkungan sebagai wujud pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo kota Malang.
 - a. Pembangunan Pavingisasi
 - b. Pembangunan Gorong-gorong
3. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan sarana prasarana lingkungan sebagai wujud pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Dinoyo kota Malang.
 - a. Faktor pendukung
 - b. Faktor penghambat

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Jalan MT Haryono XIII dengan pertimbangan bahwa:

1. Kelurahan Dinoyo merupakan kelurahan yang memiliki potensi khas yang tidak dimiliki oleh kelurahan lain di kecamatan Lowokwaru yakni industri keramik.

2. Kelurahan Dinoyo merupakan salah satu kelurahan yang masih aktif dalam melestarikan budaya bersih desa yang hampir setiap tahun diadakan.

Sedangkan untuk menangkap keadaan atau fenomena yang sebenarnya dari obyek yang diteliti, merupakan situs penelitian. Jadi yang dimaksud situs penelitian adalah lokasi atau tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data maupun informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Adapun yang menjadi situs penelitian adalah Kantor Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru, yang mencakup segenap ruang-ruang kerja pada kantor tersebut. Penelitian situs ini didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi/tempat tersebut memungkinkan untuk memperoleh data atau informasi yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan asal data yang diperoleh dan dari sumber tersebut dapat diberikan informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Adapun sumber data pada penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan dari narasumber yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti.

2. Data Sekunder

Yaitu data lengkap/penunjang data primer yang dikumpulkan dari data yang sesuai. Data ini dapat berupa dokumentasi, majalah, dan arsip-arsip yang sesuai dengan dengan keperluan peneliti.

Sedangkan yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah:

a. Informan

Informan adalah orang dalam yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah semua staf Kelurahan Dinoyo dan ketua penanggung jawab Pokmas di Kelurahan Dinoyo.

b. Dokumen

Dokumen yang digunakan adalah yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian. Dokumen ini diperoleh dari Kantor Kelurahan Dinoyo.

c. Peristiwa

Peristiwa yang dimaksud dari penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kelurahan Dinoyo dalam melaksanakan pembangunan sarana prasarana lingkungan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini metode pengumpulan data yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview)

Yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan terhadap narasumber untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan kajian penelitian. Wawancara ini dilakukan pada waktu dan saat yang tepat untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dan dapat mengungkap tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Kelurahan Dinoyo dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat beserta faktor-faktor yang terkait dengan upaya tersebut. Dan dalam hal ini yang bertindak sebagai narasumber adalah: Lurah Kelurahan Dinoyo, perangkat /pegawai Pemerintah Kelurahan Dinoyo dan masyarakat yang telah ikut berpartisipasi dalam program tersebut.

2. Observasi (Pengamatan Langsung)

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap obyek-obyek yang diteliti. Observasi dalam kegiatan ini digunakan untuk mengamati bagaimana proses berlangsungnya Program Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Dinoyo. Kegiatan-kegiatan yang diamati diantaranya adalah: proses pelaksanaan Program Pemberdayaan yang dilaksanakan di kelurahan Dinoyo dan peran serta serta tanggapan masyarakat mengenai program tersebut. Teknik ini bermanfaat untuk mengetahui kebenaran-kebenaran data primer khususnya yang diberikan oleh Kelurahan dan perangkat pemerintahan Kelurahan serta masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam program tersebut.

3. Dokumentasi

Merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan melakukan pencatatan pada sumber-sumber data yang ada pada lokasi penelitian. Data ini merupakan data sekunder dan data yang pada umumnya sudah ada, yaitu seperti: arsip-arsip, dokumen-dokumen ataupun peraturan-peraturan dan surat keputusan yang ada di Kantor Kelurahan Dinoyo.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang bertindak melakukan penelitian adalah peneliti itu sendiri, dengan segenap aktivitasnya dalam menyerap dan mengambil data di lapangan. Sehingga dalam penelitian, peneliti tersebut langsung terjun ke lapangan sebagai pencari data untuk bahan penelitian dengan menggunakan alat bantu dalam melaksanakan penelitian yaitu interview guide sebagai materi pedoman wawancara, catatan lapangan (*field notes*) yang dipergunakan untuk mencatat hasil wawancara, hasil pengamatan dan pandangan penulis terhadap apa yang dilihat dan didengar melalui wawancara atau observasi tersebut serta alat bantu lainnya untuk mengambil data di lapangan seperti alat tulis atau catat-mencatat.

G. Analisis Data

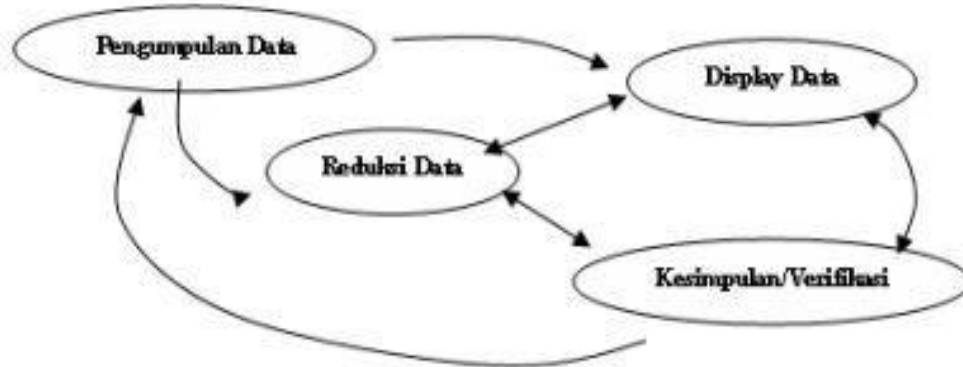
Menurut Moleong (2006:289) analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, dimana setelah data yang terkumpul tersebut diolah kemudian dianalisa dengan memberikan penafsiran berupa uraian diatas tersebut.

Adapun kegiatan dalam analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman (dalam Moleong, 1992: 19-20), bahwa analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu sebagai berikut :

Gambar 1

BAGAN ANALISIS DATA MODEL INTERAKTIF



Sumber: Miles dan Huberman (1992)

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek-proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data bukanlah hal yang terpisah dari analisa. Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang di kode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang diringkas dari sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang berkembang, semuanya itu merupakan pilihan analisa. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa yang menajamkan, emnggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data dikaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data, kita dapat memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian, sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan tabel-tabel, gambar dan bentuk teks naratif atau kesimpulan kalimat.

3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan dari penelitian sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data yang utuh selama penelitian berlangsung. Dari hasil data yang dikumpulkan dan

dianalisa dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi mengungkit sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran analisis dalam menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan. Teknik yang digunakan untuk memverifikasikan adalah ketekunan, pengamatan, kecukupan refrensial dan pengecekan ulang.

Diatas telah dikemukakan 3 hal utama, yaitu reduksi data, penyajian data serta penyimpulan dan verifikasi sehingga sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisa”.

Dalam analisis data kualitatif model interaktif yang digunakan peneliti merupakan upaya terus-menerus yang mencakup tahapan-tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai kerangka analisa yang saling susul-menyusul dan sennatiasa merupakan bagian dari lapangan (Miles dan Huberman, 1992: 20). Oleh karena itu, dalam penelitian ini setiap data-data yang diperoleh mengenai partisipasi masyarakat pada pembangunan sarana prasarana lingkungan melalui program pemberdayaan masyarakat kelurahan di kelurahan dinoyo kota malang akan dilakukan dengan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga tahapan tersebut akan coba dianalisis secara lebih dalam agar memperoleh hasil penelitian yang memuaskan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Gambaran Umum Kota Malang

Peneliti mengambil lokasi penelitian di kota Malang, yaitu sebuah kota di provinsi Jawa Timur yang berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak 90 km sebelah selatan kota Surabaya, dan wilayahnya dikelilingi oleh kabupaten Malang. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur, dan dikenal dengan julukan Kota Pelajar, Pesiar, Peristirahatan, Militer, Sejarah dan Kota Bunga. Kota Malang termasuk kota yang memiliki sejarah, dimana dulunya adalah sebuah kerajaan yang berpusat di wilayah Dinoyo, dengan rajanya Gajayana.

Kota Malang seperti kota-kota yang lain di Indonesia pada umumnya baru tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas umum dulunya direncanakan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif itu masih bisa dilihat hingga sekarang, misalnya tata ruang Ijen Boulevard dan kawasan sekitarnya hanya dinikmati oleh kalangan-kalangan Belanda dan bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai.

Pada tahun 1879 di kota Malang mulai beroperasi kereta api. Sejak saat itu kota Malang berpembang pesat. Berbagai kebutuhan masyarakat pun semakin meningkat terutama kebutuhan akan ruang gerak untuk melakukan berbagai kegiatan, akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah dari pertanian menjadi perumahan dan industri, daerah yang terbangun bermunculan tanpa ada kendali.

Perubahan yang terjadi di kota Malang sejalan dengan urbanisasi yang terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat diluar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang selanjutnya berakibat pada timbulnya perumahan-perumahan liar yang umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api, dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Selang beberapa lam daerah itu menjadi perkampungan dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi.

b. Penduduk

Kota Malang memiliki luas 110,06 km persegi, kota dengan jumlah penduduk sampai akhir Juni 2008 sebesar 835.157 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7106 jiwa per kilometer persegi. Tersebar di 5 Kecamatan (Klojen = 114.709 jiwa, Blimbing = 183.634 jiwa, Kedungkandang = 185.334 jiwa, Sukun = 191.878 jiwa, dan Lowokwaru = 159.606 jiwa).

Tabel 1

DATA KEPENDUDUKAN KOTA MALANG TAHUN 2011

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH KK
	Laki-laki	Perempuan	Total	
Blimbing	99.774	99.526	199.300	56.637
Klojen	58.202	60.095	118.297	34.197
Kedungkandang	101.875	101.398	203.273	55.792
Sukun	102.345	101.319	203.664	56.423
Lowokwaru	85.421	84.698	170.119	49.196
TOTAL	447.617	447.036	894.653	252.245

Sumber: Arsip pengelolaan dan Informasi 2011

Pada tabel 1 ditampilkan data kependudukan kota Malang tahun 2011, dibedakan menurut jenis kelamin dan juga dipilah menurut kategori wajib KK atau KTP.

1) Komposisi

Etnik masyarakat Malang terkenal religius, dinamis, suka bekerja keras, lugas, dan bangga dengan identitasnya sebagai “Arema”. Komposisi penduduk asli berasal dari berbagai etnik (terutama suku Jawa, Madura, sebagian kecil keturunan Arab dan Cina).

2) Agama

Masyarakat Malang sebagian besar adalah pemeluk Islam, kemudian Kristen, Katholik, dan sebagian kecil Hindi dan Budha.

3) Seni Budaya

Kekayaan etnik dan budaya yang dimiliki kota Malang berpengaruh terhadap kesenian tradisional yang ada. Salah satunya yang terkenal adalah Tari Topeng, namun kini makin terkikis kesenian modern.

4) Bahasa

Bahasa Jawa, dialek Jawa Timuran adalah bahasa sehari-hari masyarakat Malang. Di kalangan generasi muda berlaku dialek khas Malang yang disebut “boso walikan” yaitu cara pengucapan kata secara terbalik.

c. Letak Geografis

Terletak pada ketinggian antara 440-667 meter di atas permukaan air laut. 112,06° - 112,07° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02° Lintang Selatan, dengan dikelilingi gunung-gunung :

- 1) Gunung Arjuno di sebelah utara
- 2) Gunung Semeru di sebelah timur
- 3) Gunung Kawi dan Panderman di sebelah barat
- 4) Gunung Kelud di sebelah selatan

Kondisi iklim rata-rata suhu udara berkisar antara 22,2°C – 24,5°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,3°C dan suhu minimum 17,8°C. Rata kelembaban udara berkisar 74% - 82% dengan kelembaban maksimum 97% dan minimum mencapai 37%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan, dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso, curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Desember.

Sedangkan pada bulan Juni, Agustus, dan November curah hujan relatif rendah.

Kota Malang dikelilingi oleh gunung-gunung :

- 1) Sebelah utara terdapat Gunung Arjuna (3.399 m) dan Gunung Anjasmara (2.277 m)
- 2) Sebelah timur terdapat Gunung Semeru (3.676 m) dan Gunung Bromo (2.392 m)
- 3) Sebelah barat terdapat Gunung Kawi (2.625 m) dan Gunung Kelud (1.731 m)
- 4) Sebelah selatan terdapat Pegunungan Kapur (650 m)

d. Wilayah Administratif

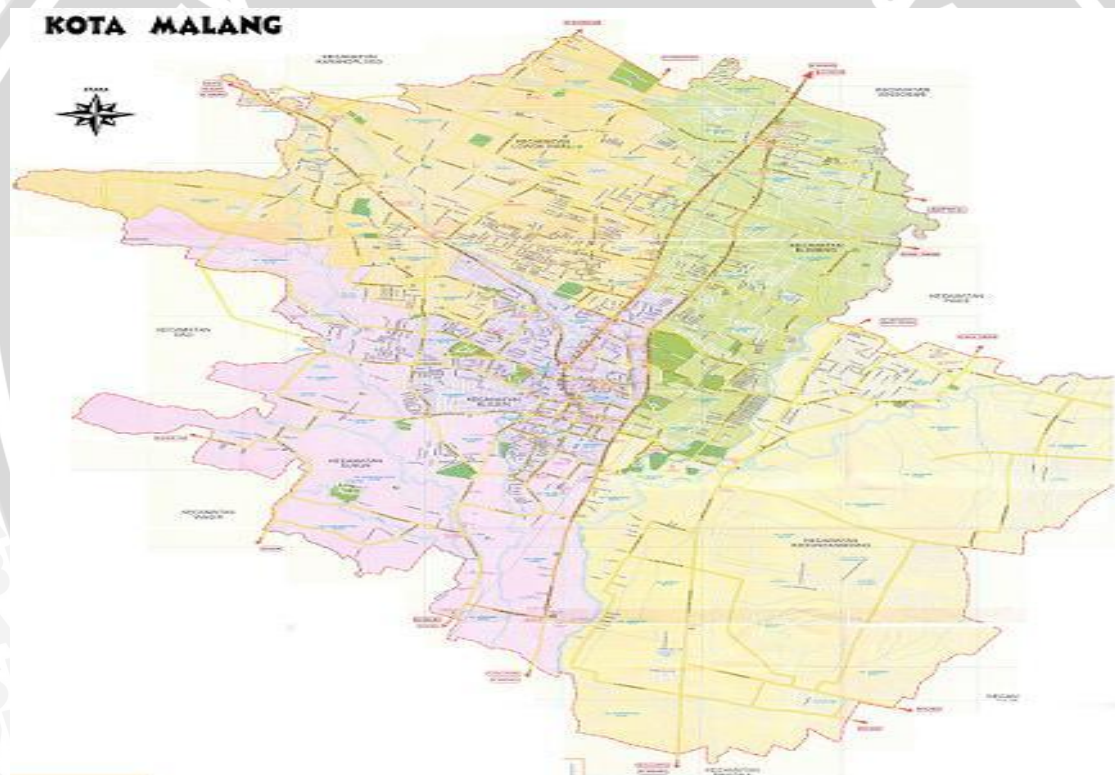
Kota Malang berada di tengah-tengah wilayah administrasi Kabupaten Malang, memiliki letak geografis yang cukup strategis dan pintu masuk kota yang dibawah beberapa wilayah yang sekaligus merupakan batasan wilayah administratif sebagai berikut :

- 1) Wilayah utara kota Malang berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.
- 2) Wilayah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.
- 3) Wilayah timur berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

- 4) Wilayah barat berbatasan dengan Kecamatan Dau dan Kecamatan Karangploso, Desa Sutirejo, Sidorahayu, Pandung, Landung, Kalisongo, Karang Widoro, Tlogowaru dan Landungsari Kabupaten Malang.

Gambar 1

PETA KOTA MALANG



Sedangkan secara administratif pemerintahan kota Malang dibagi menjadi 5 (lima) wilayah kecamatan, yaitu kecamatan Klojen, kecamatan Lowokwaru, kecamatan Blimbing, kecamatan Sukun dan kecamatan Kedungkandang. Berdasarkan PP Nomor 15 tahun 1987, kota Malang mendapat penambahan 12 (dua belas) desa dari Kabupaten Malang. Desa-desa tersebut antara lain Desa

Cemorokandang, Desa Arjowinangun, Desa Tlogowaru, Desa Tasikmadu, Desa Tunggul Wulung, Desa Tlogomas, Desa Merjosari, Desa Bandulan, Desa Mulyorejo, Desa Bakalan Krajan, dan saat ini telah menjadi bagian dari pemekaran kecamatan yang ada di kota Malang. Pembagian luas wilayah kota Malang dari masing-masing kecamatan beserta jumlah kelurahannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2

LUAS KOTA MALANG TAHUN 2010

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (km)	Presentase terhadap luas kota (%)
1.	Kedung Kandang	12	39,89	36,25%
2.	Klojen	11	8,83	8,02%
3.	Blimbing	11	17,77	16,14%
4.	Lowokwaru	12	22,60	20,54%
5.	Sukun	11	20,97	19,05%
Jumlah		57	110,06	100%

Sumber: Kota Malang Dalam Angka, BPS Kota Malang Tahun 2009/2010

Berdasarkan tabel 2 luas kota Malang secara keseluruhan dapat diketahui dari jumlah kelurahan pada tiap-tiap kecamatan serta luas wilayah masing-masing kecamatan. Jumlah keseluruhan sebanyak 57 kelurahan, dan luas secara keseluruhan kota Malang adalah 110, 06 km, dengan kecamatan terluas yaitu kecamatan Kedungkandang dengan luas 39,89 km atau sekitar 36,25% luas keseluruhan kota Malang, serta kecamatan terkecil adalah kecamatan Klojen dengan luas 8,83 km atau sekitar 8,02% luas keseluruhan kota Malang.

e. Visi dan Misi Kota Malang

Pemerintah kota Malang dalam pelaksanaan pembangunan berpedoman pada PROPEDA dimana di dalamnya termuat Visi kota Malang, yaitu “Terwujudnya Kota Malang yang Mandiri, Berbudaya, Sejahtera dan Berwawasan Lingkungan”. Terdapat beberapa pengertian yang berhubungan dengan Visi kota Malang, yaitu :

- 1) Mandiri, artinya bahwa kedepannya kota Malang diharapkan mampu membiayai sendiri seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan memanfaatkan segala sumber daya lokal (SDA, potensi daerah SDM yang dimiliki).
- 2) Berbudaya, artinya bahwa pelaksanaan otonomi daerah tetap mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat kota Malang dan mengembangkan pendidikan untuk mengantisipasi perkembangan kota Malang menuju kota metropolitan.
- 3) Sejahtera, artinya bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di kota Malang semuanya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kota, baik secara materiil maupun spiritual.
- 4) Berwawasan lingkungan, artinya bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan tetap berupaya untuk menjaga kelestarian alam dan kualitas lingkungan serta pemukiman kota Malang.

Dalam rangka mewujudkan Visi kota Malang tersebut, penjabaran Misi kota Malang adalah :

- 1) Mewujudkan Kota Malang sebagai kota pendidikam melalui peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat miskin perkotaan;
- 2) Mewujudkan Kota Malang sebagai kota sehat melalui peningkatan kualitas kesehatan masyarakat bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan penghijauan kota;
- 3) Mewujudkan semangat dan cita-cita reformasi dalam upaya pemulihan ekonomi kota menuju terwujudnya Indonesia baru berlandaskan pada: negara dengan pondasi sistem kehidupan ekonomi, sosial, budaya, yang dijiwai prinsip-prinsip demokrasi kebangsaan dan keadilan sosial dalam ikut serta menertibkan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan kota Malang;
- 4) Mewujudkan tuntutan reformasi dalam tatanan sistem politik pemerintahan dan tatanan paradigma pembangunan berdasarkan pada: wawasan kebangsaan, demokrasi, persatuan dan kesatuan, otonomi daerah, iman dan taqwa, budi pekerti, hak asasi manusia, dan keadilan sosial;
- 5) Mewujudkan upaya reformasi melalui pembenahan sistem administrasi publik dan sistem administrasi kebijakan publik, syarat rasa kebersamaan seluruh masyarakat yang pluralistik, persatuan dan kesatuan, kerjasama dan merupakan gerakan rakyat;

- 6) Menjadikan tekad mengentaskan kemiskinan menjadi landasan prioritas pembangunan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 7) Mendayagunakan secara optimal potensi penduduk, posisi geografis strategis dan sumber daya alam yang memadai untuk memajukan masyarakat kota Malang dan kontribusi maksimal bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

2. Gambaran Umum Kelurahan Dinoyo

a. Luas dan Batas Wilayah

Wilayah kerja kelurahan Dinoyo dibagi menjadi 3 (tiga) lingkungan :

1. Lingkungan Dinoyo
2. Lingkungan Gajayana
3. Lingkungan Kanjuruhan

Luas wilayah kelurahan Dinoyo adalah 142,8 ha, sedangkan batas wilayahnya adalah:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Jatimulyo
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Sumber Sari
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Merjosari
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Ketawanggede

b. Kondisi Geografis

Kelurahan Dinoyo dilihat dari topografinya merupakan daerah dataran tinggi. Sedangkan dilihat dari orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan kelurahan) adalah :

1. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 3 km
2. Jarak dari pusat pemeritahan kota 6 km
3. Jarak dari pusat kedudukan Bakorwil 4 km
4. Jarak dari ibukota propinsi 98 km
5. Jarak dari ibukota negara 800 km

Sampai dengan bulan Desember 2012, kelurahan Dinoyo mempunyai jumlah penduduk sebagai berikut :

Tabel 3

JUMLAH PENDUDUK KELURAHAN DINOYO TAHUN 2012

No.	Uraian	Tahun 2012
1.	Penduduk	15.717 Jiwa
2.	Laki-laki	8.412 Jiwa
3.	Perempuan	7.302 Jiwa
4.	Usia 0-15 tahun	3.672 Jiwa
5.	Usia 15-65 tahun	9.452 Jiwa
6.	Usia 65 tahun ke atas	2.593 Jiwa
7.	KK	3.075 KK
8.	RW	7
9.	RT	51
10.	Linmas / Hansip	34

Sumber: Profil Kelurahan Dinoyo

c. Struktur Pemerintahan Kelurahan Dinoyo

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No. 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Malang dan Keputusan Walikota Malang No. 390 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan se-Kelurahan yang Berada di Wilayah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

d. Potensi Kelurahan Dinoyo

1. Penduduk dan sosiologi

Luas wilayah kelurahan Dinoyo secara keseluruhan adalah 142,8 km², dihuni oleh 15.717 jiwa. Terbagi atas 7 Rukun Warga dan 51 Rukun Tetangga dan dihuni oleh 3.075 Kepala Keluarga dengan perincian:

- a. Penduduk laki-laki sebanyak 8.412 jiwa.
- b. Penduduk perempuan sebanyak 7.302 jiwa.

2. Komposisi Etnik

Masyarakat kelurahan Dinoyo terkenal religius, dinamis, suka kerja keras, lugas dan bangga dengan identitasnya sebagai warga kelurahan Dinoyo. Komposisi penduduk asli berasal dari berbagai etnik terutama suku Jawa, Madura, sebagian Arab dan Cina.

3. Pendidikan

Lingkungan yang aman dan tenang, biaya hidup yang relatif murah merupakan tempat yang ideal untuk belajar dan menimba ilmu.

Ketersediaan sarana pendidikan yang lengkap baik formal maupun informal berikut fasilitas yang memadai dengan mutu nasional menjadikan kelurahan Dinoyo memiliki beberapa lembaga pendidikan antara lain Perguruan Tinggi (PT), SLTA, SD/MI, TK/TA, Play Group dan TPQ/TPI baik yang berstatus negeri ataupun swasta.

4. Industri

Banyak industri kecil maupun industri sedang yang ada di kelurahan Dinoyo, namun yang sangat terkenal adalah industri keramik yang sudah terkenal nasional, yang merupakan produk unggulan dari kelurahan Dinoyo.

Banyak toko-toko keramik yang ada di kelurahan Dinoyo, bahkan hingga masuk ke perkampungan dengan menyusuri gang-gang yang relatif sempit.

Seni keramik Dinoyo adalah pabrikan, namun kualitas dan bentuknya sangat bagus dan beragam. Ini berpotensi untuk dijadikan ciri khas kota Malang. Aneka ragam seni seni keramik yang menjadi khasnya adalah jenis:

- a. Keramik hias : tempat duduk, payung, guci, pot, vas, dan keramik.
- b. Kontemporer dan patung.
- c. Batu tahan api bentuk dan formal.
- d. Isolator listrik.

5. Ekonomi

Peranan masyarakat di bidang ekonomi sangat menonjol mengingat kelurahan Dinoyo dibelah oleh jalan raya jurusan kota pariwisata Batu, maka sangat berpotensi sekali masyarakatnya dalam meningkatkan taraf ekonominya di segala bidang industri keramik yang merupakan produk unggulan kelurahan Dinoyo.

6. Kesehatan

Di bidang kesehatan kelurahan Dinoyo telah dilengkapi sarana dan prasarana antara lain :

- a. Rumah sakit sebanyak 1 buah
- b. Puskesmas sebanyak 1 buah
- c. Dokter praktek sebanyak 10 orang
- d. Apotik sebanyak 4 buah
- e. Toko obat dan jamu sebanyak 1 buah
- f. Panti pijat sebanyak 1 buah
- g. Bidan dan perawat sebanyak 20 orang
- h. Posyandu sebanyak 8 kelompok

7. Keamanan dan Ketertiban

Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kewajiban kita bersama. Kemtibmas di kelurahan Dinoyo dapat dikatakan terkendali dengan baik dengan kerjasama antara masyarakat dengan Babin kamtibmas / Kasatgas Hansip (Linmas) yang berjalan dengan baik.

Dengan total 40 hansip (Linmas) yang terlatih serta jumlah pos kamling sebanyak 22 buah dengan dibantu 12 orang kelompok diharapkan

kelurahan Dinoyo kehidupan masyarakatnya semakin aman, tentram dan kondusif.



B. Fokus Penelitian

1. Proses Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Sebagai Wujud Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo Kota Malang.

a. Tahap Sosialisasi

Dalam membangun sarana prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan khususnya di kelurahan Dinoyo kota Malang tidak terlepas dari partisipasi dan keikutsertaan masyarakat sekitar yang merupakan aktor utama yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut. Tahap sosialisasi merupakan langkah pertama dalam mengenalkan kepada masyarakat sekitar tentang visi misi serta informasi lainnya seputar program tersebut.

Menurut Sekretaris Lurah di kelurahan Dinoyo pada hari Senin 18 Maret 2013, tahap sosialisasi dimulai dengan mengundang seluruh ketua RT, ketua RW, dan tokoh-tokoh masyarakat / sesepuh desa untuk menjelaskan dan memberikan informasi tentang anggaran yang diperoleh kelurahan Dinoyo pada periode Program Pemberdayaan Masyarakat tahun 2012. Selain membicarakan tentang anggaran, masyarakat juga diberikan informasi mengenai tujuan dari program ini, yaitu:

- 1) Masalah pengelolaan sarana prasarana lingkungan.
- 2) Pengembangan kemampuan organisasi masyarakat dalam pengelolaan sarana prasarana dan pelestarian lingkungan hidup.

- 3) Pengembangan sistem pemantauan oleh masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam.
- 4) Pengembangan kapasitas aparat pemerintah dan lembaga masyarakat.

Menurut Lurah kelurahan Dinoyo pada wawancara langsung yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2012, mengatakan bahwa:

“Tujuan dari Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo khususnya dalam pembangunan sarana dan prasarana lingkungan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif dan pelayanan sosial. Sasarannya adalah tersedianya sarana prasarana yang mendukung kegiatan produksi dan pemasaran, pelayanan sosial, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya”.

Selanjutnya menurut Sekretaris kelurahan Dinoyo pada wawancara langsung yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2012, mengatakan bahwa:

“Sosialisasi Program Pemberdayaan Masyarakat dimulai dengan membicarakan tentang anggaran yang diperoleh kelurahan Dinoyo sebesar 500 juta rupiah yang berasal dari APBD beserta penjelasan mengenai rinciannya. Rincian pembagiannya yaitu 60% untuk pembangunan sarana prasarana fisik dan 40% untuk pelatihan masyarakat non-fisik.”

Menurut data yang diperoleh dari kantor kelurahan Dinoyo kota Malang, anggaran yang diberikan kepada masing-masing kelurahan besarnya tidak sama, tergantung kebutuhan dan kapasitas masing-masing wilayahnya, jadi pertemuan yang telah dijelaskan diatas adalah langkah awal yang sangat tepat dalam mensosialisasikan Program Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Dinoyo ini.

b. Tahap Perencanaan

Perencanaan pembangunan sarana prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan tidak dapat dipisahkan dari peran dan pendapat masyarakat di dalamnya. Menurut Sutoro Eko (2003: 18) dalam tulisannya yang berjudul “Melalui Perspektif Ekonomi Politik” menjelaskan tentang pentingnya partisipasi yang mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

- 1) Voice (suara), yakni setiap warga mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dalam proses pemerintahan. Pemerintah, sebaliknya, mengakomodasi setiap suara yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai basis pembuatan keputusan.
- 2) Akses, yakni setiap warga mempunyai kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi pembuatan kebijakan, termasuk akses dalam layanan publik.
- 3) Kontrol, yakni setiap warga atau elemen-elemen masyarakat mempunyai kesempatan dan hak untuk melakukan pengawasan (control) terhadap jalannya pemerintahan maupun pengelolaan kebijakan dan keuangan pemerintah.

Proses selanjutnya setelah dilaksanakan sosialisasi yaitu mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) yang membahas tentang perencanaan pembangunan dan menentukan skala prioritas untuk tiap wilayah di kelurahan Dinoyo. Anggota Musrenbangkel terdiri dari 10 pihak, yaitu:

- 1) Panitia kecil / panitia penyelenggara yang terdiri dari masyarakat yang telah ditunjuk dan aparatur kelurahan yang telah ditunjuk pula.
- 2) Seluruh ketua RT dan ketua RW di kelurahan Dinoyo.
- 3) Perwakilan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
- 4) PKK
- 5) Karang Taruna

- 6) Karang Wreda (lansia)
- 7) Kader Lingkungan
- 8) Koperasi wanita
- 9) Tokoh masyarakat / sesepuh desa
- 10) Seluruh anggota LPMK

Berikut ini adalah data mengenai daftar warga yang hadir dalam rapat Musrenbangkel yang diadakan pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 di kelurahan Dinoyo:

Tabel 4

DAFTAR HADIR WARGA PADA RAPAT MUSRENBANGKEL

No.	Nama	Alamat
1.	Budi Santoso	MT. Haryono X / 1227
2.	Sunawan	MT. Haryono X / 1117
3.	Sri Wahyuni	MT. Haryono XI / 470
4.	A. Gafur	MT. Haryono 17 / 214
5.	Nurhidayati	MT. Haryono XVI / 198A
6.	Sukari	Jl. Gajayana I / 743
7.	B. Ipong SP	MT. Haryono I / 23
8.	Bawon Trimukti	MT. Haryono I / 22
9.	Sulitijanto	MT. Haryono III / 229
10.	H. Kasman	MT. Haryono X / 119
11.	Asmuri	MT. Haryono VI / 834
12.	Bambang Ponco	Sunan Ampel I / 6
13.	Supri Yono	Jl. Gajayana I / 752
14.	Junari	Jl. Gajayana I
15.	H. Supri Niam	Jl. Gajayana I
16.	Kusnadi Abd.	Jl. Gajayana I / 697
17.	Syamsul Arifon	MT. Haryono XIX / 474
18.	Erwin Mulyo P.	MT. Haryono XIX / 30
19.	Wiyanto	MT. Haryono 17 / 211
20.	Sukarno	MT. Haryono 17 / 221
21.	Bimo	Jl. Gajayana V / 588

22.	Sari Yani	MT. Haryono I / 12
23.	Sri Handayani	MT. Haryono XI / 355
24.	Tiwuk R.	Jl. Gajayana I / 703
25.	Eko Syamsi	Polresta
26.	Ny. Misnan	MT. Haryono 8E / 914
27.	Ny. Titik Jamil	MT. Haryono XVI / 6
28.	Ny. Dofir	PKK Kelurahan
29.	Nel Zam zami	BKBPM
30.	Pratiwi	BKBPM
31.	Anas Zaimuri	Kec. Lowokwaru
32.	Gatot Suyantono	Ketua RT 03 / VII
33.	Donny Wahyu	Bappeda
34.	Edie	Kelurahan Dinoyo
35.	Heri S.	Kelurahan Dinoyo
36.	Eko W.	Kelurahan Dinoyo
37.	Wagiran	Kelurahan Dinoyo
38.	Diah	Kelurahan Dinoyo
39.	Nurhayati	Kelurahan Dinoyo
40.	Sri Bauon	Kelurahan Dinoyo
41.	Muraim	Kelurahan Dinoyo
42.	Wahyu H.	Kelurahan Dinoyo
43.	Rustamaji	Kecamatan Lowokwaru
44.	Ny. Sodik	PKK Kelurahan
45.	Samiani	Kecamatan Lowokwaru
46.	Setiaji	MT. Haryono 665
47.	Ny. Asri	PKK Kelurahan
48.	Supeno	MT. Haryono GG 11
49.	Bambang S.	MT. Haryono X
50.	Sulistiyono	MT. Haryono III / 235

Sumber: Laporan Hasil Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dinoyo tahun 2012

Menurut Sekretaris kelurahan Dinoyo pada wawancara langsung yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 menjelaskan tentang agenda dalam Musrenbangkel, yaitu:

“Musrenbangkel membahas tentang perencanaan pembangunan yang nantinya akan dilaksanakan di wilayah kelurahan Dinoyo. Di dalam musyawarah ini semua anggota Musrenbangkel mengajukan usulan tentang rencana pembangunan dan menentukan skala prioritas dari masing-masing pengajuan yang diajukan oleh masing-masing RW yang

mana nantinya setiap Pokmas di masing-masing RW akan mendapatkan pembagian sesuai kebutuhan dan sesuai kapasitas wilayahnya”

c. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di kelurahan Dinoyo harus sesuai dengan prosedur yaitu membentuk Kelompok-kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai langkah awal dalam pelaksanaan program ini. Tugas Pokmas adalah menampung aspirasi warga kelurahan, memberikan usul dan saran kepada Lurah tentang penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, menjelaskan kebijakan pemerintah kelurahan kepada warga kelurahan, membantu Lurah dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dari proses awal hingga akhir. Pemilihan ketua Pokmas dilakukan oleh warga sekitar dan nantinya ketua Pokmaslah yang bertugas mengatur jalannya pekerjaan di wilayah RWnya masing-masing.

Sedang pada tahap pelaksanaan, warga masyarakat beranggapan bahwa, siapapun boleh terlibat, apalagi prasarana yang dibangun berada di lingkungan permukiman warga. Senada dengan hal ini, Ericson (dalam Slamet, 1994:89) mengatakan bahwa partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (implementation stage) dimaksudkan adalah pelibatan seseorang pada tahapan pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang atau pun material sebagai salah satu wujud partisipasi pada pekerjaan tersebut. Maka dari itu, selain mendapatkan bantuan dana dari pemerintah, ditambah pula dengan partisipasi masyarakat. Penentuan swadaya ini sendiri yaitu 10% dari bantuan yang diterima.

Di kelurahan Dinoyo sendiri warga RW 01 – RW 05 apabila dilihat dari segi geografis maka tergolong masyarakat perkampungan yang sebagian warganya masuk ke dalam golongan ekonomi menengah kebawah. Maka dari itu, bentuk swadaya yang mereka berikan berupa bantuan jasa / tenaga, sedangkan warga RW 6 dan RW 7 yang wilayah geografisnya berupa wilayah perumahan, maka bantuan yang diberikan warganya sebagian besar berupa uang.

Lurah Dinoyo memberikan pendapat mengenai pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Dinoyo pada wawancara langsung yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 bahwa:

“Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Dinoyo sudah sangat maksimal, karena semua program kegiatan dapat terlaksana dengan baik sehingga sarana dan prasarana sudah layak dipergunakan dan perekonomian warga juga ikut terbantu dengan adanya Program Pemberdayaan Masyarakat ini”.

Sedangkan menurut Sekretaris kelurahan Dinoyo dalam wawancara langsung yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 adalah:

“Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat yang memfokuskan pada kegiatan padat karya ini sangat membawa dampak positif, dimana sarana dan prasarana warga menjadi lebih baik dan kehidupan perekonomian warga juga meningkat dikarenakan upah kerja yang diberikan kepada mereka lumayan tinggi”.

Senada dengan pendapat dari Lurah dan Sekretaris kelurahan Dinoyo, Ketua Penanggung Jawab Pokmas mengutarakan pendapatnya dalam wawancara langsung yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 bahwa:

“Dengan adanya program pemberdayaan di kelurahan Dinoyo maka dapat dilihat perbaikan sarana dan prasarana sudah baik dan tertata rapi. Sedangkan proses pelatihan keterampilan masyarakat juga sudah berjalan dengan baik karena sebagian warga memiliki keterampilan baru bahkan

ada yang sudah mulai membuka usahanya sendiri. Hal tersebut dapat membantu meningkatkan perekonomian mereka”.

Saat peneliti melakukan observasi langsung di lapangan, keadaan jalan dan jembatan sudah tertata rapi dan saluran air di perkampungan warga sudah berjalan dengan baik, menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat sudah berjalan dengan baik.

d. Tahap Pengawasan

Dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat ini Pemerintah Kota Malang juga mengadakan pengawasan atas optimalisasi program pemberdayaan masyarakat di kelurahan Dinoyo. Pengawasan dilakukan supaya tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama pelaksanaan program berlangsung. Dengan dilakukannya perencanaan serta pelaksanaan oleh masyarakat, maka pengawasan / monitoring juga akan dilakukan juga oleh masyarakat sehingga hasil yang diperoleh akan sesuai keinginan masyarakat. Kegiatan pada tahapan monitoring ini penting sekali untuk memandu apakah proyek tersebut sudah sesuai dengan model (blue print) yang telah ditetapkan (Soekartawi,1990:105).

Pengawasan dilakukan oleh Tim Monitoring dan Pengawasan Pekerjaan yang terdiri dari staf kelurahan dan LPMK serta dibantu oleh masyarakat sekitar. Tugas dari tim ini yaitu memeriksa dan mengevaluasi pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Bentuk pengawasannya yaitu Tim Monitoring dan Pengawasan Pekerjaan yang terdiri dari 8 orang dari pihak kelurahan dan LPMK datang

langsung ke tempat pembangunan yang dilakukan setiap 1 minggu sekali di tiap-tiap RW.

Pada tahap evaluasi dan pengawasan Lurah Dinoyo mengatakan dalam wawancara langsung pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 bahwa:

“Yang dilakukan setelah pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana ini selesai adalah mengadakan evaluasi dan pemantauan / pengawasan rutin yang dilakukan oleh tim khusus yang tersiri dari 4 orang staf kelurahan Dinoyo dan 4 orang perwakilan dari pihak LPMK. Yang dilakukan tim ini adalah memeriksa dan mengevaluasi pekerjaan yang sedang dilaksanakan, sehingga dengan adanya pengawasan yang rutin dapat dihasilkan hasil pekerjaan seperti yang diharapkan atau yang sudah direncanakan dari awal”.

Sedangkan Sekretaris Lurah kelurahan Dinoyo memiliki pendapat mengenai pengevaluasian program pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan dalam wawancara langsung pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 yaitu:

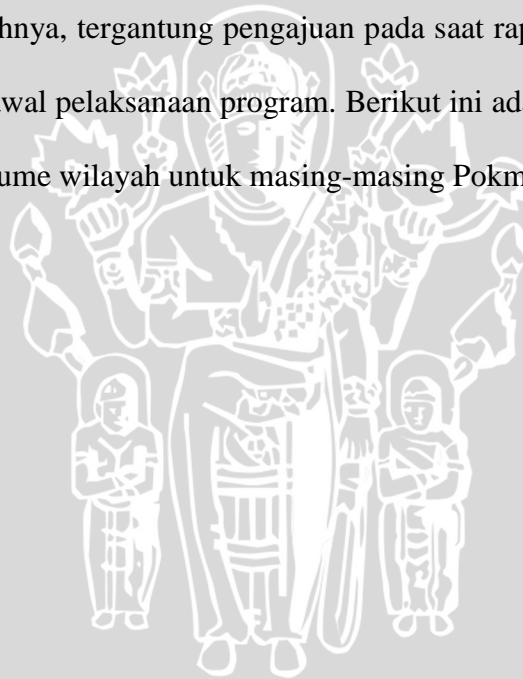
“Proses evaluasi juga tetap dilaksanakan dimana antara anggaran biaya yang dianggarkan harus sesuai dengan pengeluaran dan tidak boleh lebih besar pengeluarannya. Namun yang terjadi di kelurahan Dinoyo adalah program pemberdayaan masyarakat kelurahan ini sudah berjalan maksimal dan pada proses pembiayaannya tidak memakan biaya yang berlebih”

Menurut pengamatan peneliti di lapangan bahwa dalam proses evaluasi dan pemeliharaan tidak ditemukan kendala yang berarti. Hal tersebut dikarenakan kerjasama antara pihak kelurahan beserta LPMK selaku Tim Monitoring dan Pengawasan Pekerjaan dengan masyarakat sekitar berjalan dengan baik.

2. Hasil Yang Telah Dicapai Dari Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Sebagai Wujud Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo Kota Malang.

a. Pembangunan Pavingisasi

Kegiatan pembangunan pavingisasi di kelurahan Dinoyo tepatnya dilaksanakan di 8 Pokmas yang tersebar di 8 wilayah. Anggaran dana dari kelurahan dan volume wilayah yang akan dibangun besarnya tidak sama untuk masing-masing wilayahnya, tergantung pengajuan pada saat rapat Musrenbangkel yang dilaksanakan di awal pelaksanaan program. Berikut ini adalah rincian lokasi, anggaran dana dan volume wilayah untuk masing-masing Pokmas:



Tabel 5

**RINCIAN LOKASI, LUAS WILAYAH DAN BIAYA / ANGGARAN DANA
DALAM PAVINGISASI DI KELURAHAN DINOYO**

No.	Lokasi	Luas	Biaya (Rp)
1.	Pokmas Rajawali Jalan MT. Haryono RW.01 RT.01	49,28 M ²	5.600.000
2.	Pokmas Bakti Jaya Jalan Gajayana 4A, RW.02 RT.02	164,60 M ²	19.200.000
3.	Pokmas Dinamika I Jalan MT. Haryono XV, RW.03 RT.04	586,80 M ²	64.000.000
4.	Pokmas Dinamika II Jalan MT. Haryono IX-F, RW.03 RT.02	97,44 M ²	11.200.000
5.	Pokmas Dinamika III Jalan MT. Haryono IX-B, RW.03 RT.06	146,25 M ²	15.200.000
6.	Pokmas Kanjuruhan Jalan MT. Haryono X, RW.05 RT.04	83,75 M ²	9.600.000
7.	Pokmas Sekar Jaya Jalan MT. Haryono 19, RW.03 RT.03	916,00 M ²	101.200.000
8.	Pokmas Sunan Kalijaga Jalan Sunan Kalijaga RW.07 RT.02	270,00 M ²	27.000.000

Sumber: Laporan Hasil Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan Dinoyo tahun 2012

Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa terdapat 8 Kelompok Masyarakat / Pokmas yang tersebar di 8 wilayah kelurahan Dinoyo. Masing-masing Pokmas memiliki luas wilayah yang berbeda dan tentu saja anggaran yang diberikan di tiap wilayah juga berbeda. Dapat dilihat bahwa dari ke-8 Pokmas diatas, Pokmas Rajawali yang beralamatkan di Jalan MT. Haryono RW.01 RT.01 memiliki luas wilayah yang paling kecil yaitu 49,28 M² begitu pula dengan anggaran yang diberikan hanya 5.600.000 rupiah. Sedangkan Pokmas Sekar Jaya yang beralamatkan di Jalan MT. Haryono 19, RW.03 RT.03 memiliki luas wilayah

yang paling besar yaitu 916,00 M² begitu pula dengan anggaran dana yang diberikan juga sangat besar yaitu 101.200.000 rupiah.

Tujuan dan manfaat pemeliharaan jalan / pembangunan pavingisasi adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan bersih dan sehat serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Melihat kondisi sarana prasarana yang ada di Kelurahan Dinoyo, terutama jalan-jalan kampung dengan kondisi masih rabatan yang sering banjir bila hujan akibat tidak ada resapan, adalah salah satu alasan untuk meningkatkan kondisinya.

Menurut Sekretaris Lurah kelurahan Dinoyo dalam wawancara langsung pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan perawatan jalan dan pembangunan paving di kelurahan Dinoyo selain dapat memberdayakan masyarakat agar memperoleh pendapatan tambahan juga membantu kelancaran aktivitas warga”.

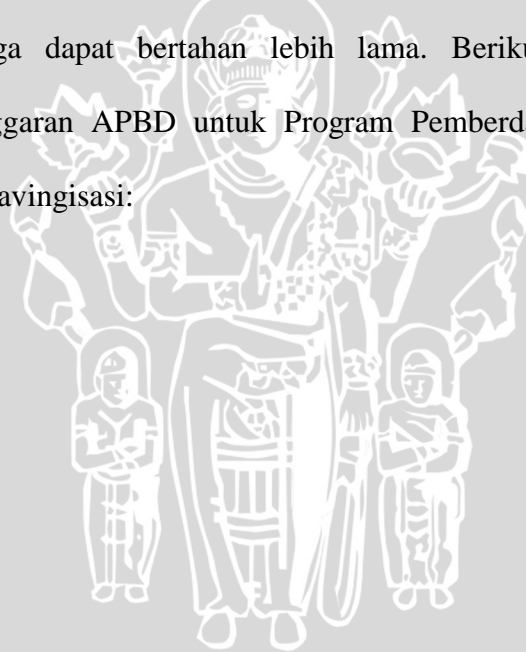
Sedangkan menurut Ketua Penanggung Jawab Pokmas melalui wawancara langsung pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 mengatakan:

“Pembangunan jalan paving ini membawa dampak positif dimana jalan yang tadinya sering banjir saat musim hujan datang sekarang sudah tertata rapi, maka keindahan jalan pun dapat terlihat. Warga juga sangat antusias dengan adanya pelaksanaan pembangunan di daerahnya karena selain mendapat upah hasil kerja juga membuat jalan di kawasan kelurahan Dinoyo menjadi lebih rapi”.

Selanjutnya penulis akan menyajikan rincian mengenai anggaran dana dan daftar warga yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan pavingisasi di masing-masing Pokmas:

1) Pokmas Rajawali

Kondisi lingkungan pada masa kini yang semakin padat, mendorong untuk diimbangi dengan kebutuhan sarana dan prasarananya. Melihat kondisi sarana prasarana yang ada di RW I, terutama jalan-jalan kampung dengan kondisi masih rabatan yang sering banjir bila hujan akibat tidak ada resapan, adalah salah satu alasan untuk meningkatkan kondisinya, diantaranya jalan Gajayana III-C, dimana kondisi jalan masih rabatan, untuk menggantinya menjadi jalan paving dengan alasan bahwa jalan paving dapat dipakai sebagai resapan dan sangat minim perawatannya sehingga dapat bertahan lebih lama. Berikut adalah rincian penggunaan dana anggaran APBD untuk Program Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan pavingisasi:



Tabel 6

**RINCIAN PENGGUNAAN DANA ANGGARAN DAN UPAH TENAGA
KERJA PEMBANGUNAN PAVINGISASI PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN DINOYO**

No.	Uraian	Total	Harga (Rp)	Termin 1	Termin 2	Termin 3	
A. Bahan Material							
1.	Pasir Urug	4 m ³	88.000	176.000	176.000	-	
2.	Pasir Pasang	1,5 m ³	110.000	110.000	55.000	-	
3.	Pasir Cor/Beton	0,5 m ³	140.800	-	-	70.400	
4.	Stenslah/batu pecah tangan 2/3	0,5 m ³	220.000	-	-	110.000	
5.	Paving block segi empat biasa	2.220 bh	1.155	1.021.020	775.005	768.075	
6.	Semen PC /40 kg	160 kg	1.485	59.400	59.400	118.800	
7.	Usuk kayu Meranti 5/7 cm	0,01 m ³	4.730.000	38.962	-	-	
8.	Papan kayu meranti 2/20 cm	0,01 m ³	6.050.000	33.275	-	-	
9.	Paku usuk	0,25 kg	19.250	4.812,50	-	-	
10.	Air bersih	140 ltr	27,50	1.530	2.095	225	
Total A				1.445.000	1.067.500	1.067.500	3.580.000
B. Upah Tenaga Kerja							
1.	Mandor	2 hari	57.500	57.500	-	57.500	
2.	Kepala tukang batu	1 hari	50.000	50.000	-	-	
3.	Kepala tukang kayu	-	50.000	-	-	-	
4.	Tukang batu	13 hari	47.500	237.500	237.500	142.500	
5.	Tukang kayu	-	47.500	-	-	-	
6.	Pekerja biasa	33 hari	37.500	450.000	375.000	412.500	
Total B				795.000	612.500	612.500	2.020.000
Jumlah						5.600.000	
Total Anggaran						5.600.000	

Sumber: Laporan Hasil Kegiatan Prorgam Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan Dinoyo 2012

Dari tabel 6 dapat diketahui bahwa pada bulan Desember 2012 Pokmas Rajawali membeli bahan-bahan material sebesar Rp. 3.580.000,00. Sedangkan untuk upah 5 tenaga kerja totalnya sebesar Rp. 2.020.000,00 dan jumlah total seluruhnya adalah Rp. 5.600.000,00.

Menurut Sekretaris Lurah kelurahan Dinoyo dalam wawancara langsung pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 menyatakan bahwa:

“Pembelanjaan bahan bangunan maupun pemberian upah kepada warga oleh Pokmas Rajawali jumlahnya sudah sesuai dengan anggaran dana yang diberikan, jadi tidak ada defisit maupun kelebihan dana. Hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan dana bantuan pemerintah oleh pihak kelurahan maupun warga itu sendiri”.

2) Pokmas Bakti Jaya

Kondisi lingkungan pada masa kini yang semakin padat, mendorong untuk diimbangi dengan kebutuhan sarana dan prasarananya. Dengan demikian dapat terawatt dengan baik kondisi disekitarnya.

Melihat kondisi sarana prasarana yang ada di RW II, terutama jalan-jalan kampung dengan kondisi masih rabatan yang sering banjir bila hujan akibat tidak ada resapan, adalah salah satu alasan untuk meningkatkan kondisinya, diantaranya jalan Gajayana IV-A, dimana kondisi jalan masih rabatan, untuk menggantinya menjadi jalan paving dengan alasan bahwa jalan paving dapat dipakai sebagai resapan dan sangat minim perawatannya sehingga dapat bertahan lebih lama.

Tabel 7

**RINCIAN PENGGUNAAN DANA ANGGARAN DAN UPAH TENAGA
KERJA PEMBANGUNAN PAVINGISASI PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN DINOYO**

No.	Uraian	Total	Harga (Rp)	Termin 1	Termin 2	Termin 3	
A. Bahan Material							
1.	Pasir Urug	14 m ³	88.000	528.000	616.000	88.000	
2.	Pasir Pasang	6 m ³	110.000	330.000	220.000	110.000	
3.	Pasir Cor/Beton	2 m ³	140.800	140.800	-	140.800	
4.	Stenslah/batu pecah tangan 2/3	2 m ³	220.000	220.000	-	330.000	
5.	Paving block segi empat biasa	7.410 bh	1.155	3.384.150	2.591.820	2.582.580	
6.	Semen PC /40 kg	820 kg	1.485	356.400	356.400	504.900	
7.	Usuk kayu Meranti 5/7 cm	0,01 m ³	4.730.000	37.840	-	-	
8.	Papan kayu meranti 2/20 cm	0,01 m ³	6.050.000	30.472	-	-	
9.	Paku usuk	0,25 kg	19.250	4.812,50	-	-	
10.	Air bersih	710 ltr	27,50	12.525	3.280	3.720	
Total A				5.045.000	3.787.500	3.760.000	12.592.500
B. Upah Tenaga Kerja							
1.	Mandor	5 hari	57.500	115.000	115.000	57.500	
2.	Kepala tukang batu	4 hari	50.000	100.000	50.000	50.000	
3.	Kepala tukang kayu	-	50.000	-	-	-	
4.	Tukang batu	42 hari	47.500	807.500	570.000	617.500	
5.	Tukang kayu	-	47.500	-	-	-	
6.	Pekerja biasa	110 hari	37.500	1.612.500	1.237.500	1.275.000	
Total B				2.635.000	1.972.500	2.000.000	6.607.500
						Jumlah	19.200.000
						Total Anggaran	19.200.000

Sumber: Laporan Hasil Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan Dinoyo 2012

Dari tabel 7 dapat diketahui bahwa pada bulan Desember 2012 Pokmas Rajawali membeli bahan-bahan material sebesar Rp. 12.592.500,00. Sedangkan untuk upah 9 tenaga kerja totalnya sebesar Rp. 6.607.500,00 dan jumlah total seluruhnya adalah Rp. 19.200.000,00.

Menurut Sekretaris Lurah kelurahan Dinoyo dalam wawancara langsung pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 menyatakan bahwa:

“Pembelanjaan bahan bangunan maupun pemberian upah kepada warga oleh Pokmas Bakti Jaya jumlahnya sudah sesuai dengan anggaran dana yang diberikan, jadi tidak ada defisit maupun kelebihan dana. Hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan dana bantuan pemerintah oleh pihak kelurahan maupun warga itu sendiri”.

3) Pokmas Dinamika I

Kondisi lingkungan pada masa kini yang semakin padat penduduknya, mendorong untuk diimbangi dengan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarannya. Karena lahan terbuka semakin berkurang, sehingga menghambat resapan air.

Melihat kondisi sarana prasarana yang ada di RW III, ada beberapa jalan alternative tidak dipergunakan masyarakat secara maksimal karena kondisi perkarasan sudah rusak parah akibat sering banjir bila hujan dan saluran yang ada tidak memadai. Jalan MT Haryono XV, dimana kondisi jalan cukup memprihatinkan, lama tidak tersentuh oleh perawatan sama sekali, sehingga semakin hari semakin parah. Ada solusi untuk menggantinya menjadi jalan paving dengan alasan bahwa jalan paving dapat dipakai sebagai resapan dan sangat minim perawatannya sehingga dapat bertahan lebih lama.

Tabel 8

**RINCIAN PENGGUNAAN DANA ANGGARAN DAN UPAH TENAGA
KERJA PEMBANGUNAN PAVINGISASI PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN DINOYO**

No.	Uraian	Total	Harga (Rp)	Termin 1	Termin 2	Termin 3	
A. Bahan Material							
1.	Pasir Urug	49 m ³	88.000	1.760.000	1.320.000	1.232.000	
2.	Pasir Pasang	21 m ³	110.000	880.000	660.000	770.000	
3.	Pasir Cor/Beton	4 m ³	140.800	211.200	140.800	211.200	
4.	Stenslah/batu pecah tangan 2/3	4 m ³	220.000	330.000	220.000	330.000	
5.	Paving block segi empat biasa	26.410 bh	1.155	12.233.760	9.263.100	9.006.690	
6.	Semen PC /40 kg	1.449 kg	1.485	861.300	653.400	637.065	
7.	Usuk kayu Meranti 5/7 cm	0,01 m ³	4.730.000	51.567,50	-	-	
8.	Papan kayu meranti 2/20 cm	0,01 m ³	6.050.000	48.400	-	-	
9.	Paku usuk	0,25 kg	19.250	4.812,50	-	-	
10.	Air bersih	1262 ltr	27,50	13.960	2.700	18.045	
Total A				16.395.000	12.260.000	12.205.000	40.860.000
B. Upah Tenaga Kerja							
1.	Mandor	18 hari	57.500	402.500	287.500	345.000	
2.	Kepala tukang batu	15 hari	50.000	300.000	250.000	200.000	
3.	Kepala tukang kayu	-	50.000	-	-	-	
4.	Tukang batu	148 hari	47.500	2.802.500	2.090.000	2.137.500	
5.	Tukang kayu	-	47.500	-	-	-	
6.	Pekerja biasa	382 hari	37.500	5.700.000	4.312.500	4.312.500	
Total B				9.205.000	6.940.000	6.995.000	23.140.000
Jumlah						64.000.000	
Total Anggaran						64.000.000	

Sumber: Laporan Hasil Kegiatan Prorgam Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan Dinoyo 2012

Dari tabel 8 dapat diketahui bahwa pada bulan Desember 2012 Pokmas Rajawali membeli bahan-bahan material sebesar Rp. 40.860.000,00. Sedangkan untuk upah 24 tenaga kerja totalnya sebesar Rp. 23.140.000,00 dan jumlah total seluruhnya adalah Rp. 64.000.000,00.

Menurut Sekretaris Lurah kelurahan Dinoyo dalam wawancara langsung pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 menyatakan bahwa:

“Pembelanjaan bahan bangunan maupun pemberian upah kepada warga oleh Pokmas Dinamika I jumlahnya sudah sesuai dengan anggaran dana yang diberikan, jadi tidak ada defisit maupun kelebihan dana. Hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan dana bantuan pemerintah oleh pihak kelurahan maupun warga itu sendiri”.

4) Pokmas Dinamika II

Kondisi lingkungan pada masa kini yang semakin padat penduduknya, mendorong untuk diimbangi dengan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarannya. Karena lahan terbuka semakin berkurang, sehingga menghambat resapan air. Melihat kondisi sarana prasarana yang ada di RW III, terutama jalan-jalan kampung dengan kondisi masih rabatan yang sering banjir bila hujan akibat tidak ada resapan, adalah salah satu alasan untuk meningkatkan kondisinya, diantaranya jalan MT Haryono IX-F, dimana kondisi jalan masih rabatan dan posisi lahan berada dibawah pemukiman lainnya, untuk menggantinya menjadi jalan paving dengan alasan bahwa jalan paving dapat dipakai sebagai resapan dan sangat minim perawatannya sehingga dapat bertahan lebih lama.

Tabel 9

**RINCIAN PENGGUNAAN DANA ANGGARAN DAN UPAH TENAGA
KERJA PEMBANGUNAN PAVINGISASI PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN DINOYO**

No.	Uraian	Total	Harga (Rp)	Termin 1	Termin 2	Termin 3	
A. Bahan Material							
1.	Pasir Urug	8 m ³	88.000	264.000	264.000	176.000	
2.	Pasir Pasang	3,5 m ³	110.000	165.000	110.000	110.000	
3.	Pasir Cor/Beton	1 m ³	140.800	-	140.800	-	
4.	Stenslah/batu pecah tangan 2/3	1 m ³	220.000	110.000	110.000	-	
5.	Paving block segi empat biasa	4.385 bh	1.155	2.007.390	1.524.600	1.532.685	
6.	Semen PC /40 kg	400 kg	1.485	237.600	118.800	237.600	
7.	Usuk kayu Meranti 5/7 cm	0,01 m ³	4.730.000	70.477	-	-	
8.	Papan kayu meranti 2/20 cm	0,01 m ³	6.050.000	59.110,50	-	-	
9.	Paku usuk	0,25 kg	19.250	4.812,50	-	-	
10.	Air bersih	350 ltr	27,50	4.110	4.300	1.215	
Total A				2.922.500	2.272.500	2.057.500	7.252.500
B. Upah Tenaga Kerja							
1.	Mandor	18 hari	57.500	57.500	57.500	57.500	
2.	Kepala tukang batu	15 hari	50.000	50.000	50.000	50.000	
3.	Kepala tukang kayu	-	50.000	-	-	-	
4.	Tukang batu	148 hari	47.500	475.000	380.000	332.500	
5.	Tukang kayu	-	47.500	-	-	-	
6.	Pekerja biasa	382 hari	37.500	975.000	600.000	862.500	
Total B				1.557.500	1.087.500	1.302.500	3.947.500
Jumlah						11.200.000	
Total Anggaran						11.200.000	

Sumber: Laporan Hasil Kegiatan Prorgam Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan Dinoyo 2012

Dari tabel 9 dapat diketahui bahwa pada bulan Desember 2012 Pokmas Rajawali membeli bahan-bahan material sebesar Rp. 7.252.500,00. Sedangkan untuk upah 6 tenaga kerja totalnya sebesar Rp. 3.947.000,00 dan jumlah total seluruhnya adalah Rp. 11.200.000,00.

Menurut Sekretaris Lurah kelurahan Dinoyo dalam wawancara langsung pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 menyatakan bahwa:

“Pembelanjaan bahan bangunan maupun pemberian upah kepada warga oleh Pokmas Dinamika II jumlahnya sudah sesuai dengan anggaran dana yang diberikan, jadi tidak ada defisit maupun kelebihan dana. Hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan dana bantuan pemerintah oleh pihak kelurahan maupun warga itu sendiri”.

5) Pokmas Dinamika III

Kondisi lingkungan pada masa kini yang semakin padat penduduknya, mendorong untuk diimbangi dengan kebutuhan sarana dan prasarananya. Karena lahan terbuka semakin berkurang, sehingga menghambat resapan air. Melihat kondisi sarana prasarana yang ada di RW III, terutama jalan-jalan kampung dengan kondisi masih rabatan yang sering banjir bila hujan akibat tidak ada resapan, adalah salah satu alasan untuk meningkatkan kondisinya, diantaranya jalan MT Haryono IX-B, dimana kondisi jalan masih rabatan, untuk menggantinya menjadi jalan paving dengan alasan bahwa jalan paving dapat dipakai sebagai resapan dan sangat minim perawatannya sehingga dapat bertahan lebih lama.

Tabel 10

**RINCIAN PENGGUNAAN DANA ANGGARAN DAN UPAH TENAGA
KERJA PEMBANGUNAN PAVINGISASI PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN DINOYO**

No.	Uraian	Total	Harga (Rp)	Termin 1	Termin 2	Termin 3	
A. Bahan Material							
1.	Pasir Urug	11,50 m ³	88.000	440.000	264.000	308.000	
2.	Pasir Pasang	5 m ³	110.000	220.000	220.000	110.000	
3.	Pasir Cor/Beton	1 m ³	140.800	-	-	140.800	
4.	Stenslah/batu pecah tangan 2/3	1 m ³	220.000	-	-	220.000	
5.	Paving block segi empat biasa	6.145 bh	1.155	2.893.275	2.320.395	1.883.805	
6.	Semen PC /40 kg	420 kg	1.485	237.600	-	386.100	
7.	Usuk kayu Meranti 5/7 cm	0,01 m ³	4.730.000	69.335	-	-	
8.	Papan kayu meranti 2/20 cm	0,01 m ³	6.050.000	54.450	-	-	
9.	Paku usuk	0,25 kg	19.250	4.812,50	-	-	
10.	Air bersih	361 ltr	27,50	5.527,50	605	3.795	
Total A				3.925.000	2.805.000	3.052.500	9.782.500
B. Upah Tenaga Kerja							
1.	Mandor	4 hari	57.500	115.000	57.500	57.500	
2.	Kepala tukang batu	3 hari	50.000	100.000	50.000	-	
3.	Kepala tukang kayu	-	50.000	-	-	-	
4.	Tukang batu	35 hari	47.500	665.000	522.500	475.000	
5.	Tukang kayu	-	47.500	-	-	-	
6.	Pekerja biasa	90 hari	37.500	1.275.000	1.125.000	975.000	
Total B				2.155.000	1.755.000	1.507.500	5.417.500
Jumlah						15.200.000	
Total Anggaran						15.200.000	

Sumber: Laporan Hasil Kegiatan Prorgam Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan Dinoyo 2012

Dari tabel 10 dapat diketahui bahwa pada bulan Desember 2012 Pokmas Rajawali membeli bahan-bahan material sebesar Rp. 9.782.500,00. Sedangkan untuk upah 8 tenaga kerja totalnya sebesar Rp. 5.417.500,00 dan jumlah total seluruhnya adalah Rp. 15.200.000,00.

Menurut Sekretaris Lurah kelurahan Dinoyo dalam wawancara langsung pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 menyatakan bahwa:

“Pembelanjaan bahan bangunan maupun pemberian upah kepada warga oleh Pokmas Dinamika III jumlahnya sudah sesuai dengan anggaran dana yang diberikan, jadi tidak ada defisit maupun kelebihan dana. Hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan dana bantuan pemerintah oleh pihak kelurahan maupun warga itu sendiri”.

6) Pokmas Kanjuruhan

Kondisi lingkungan pada masa kini yang semakin padat penduduknya, mendorong untuk diimbangi dengan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarannya. Karena lahan terbuka semakin berkurang, sehingga menghambat resapan air. Melihat kondisi sarana prasarana yang ada di RW V, ada beberapa jalan alternative tidak dipergunakan masyarakat secara maksimal karena kondisi perkarasan sudah rusak parah akibat sering banjir bila hujan dan saluran yang ada tidak memadai. Jalan MT Haryono X, dimana kondisi jalan cukup memprihatinkan, lama tidak tersentuh oleh perawatan sama sekali, sehingga semakin hari semakin parah. Ada solusi untuk menggantinya menjadi jalan paving dengan alasan bahwa jalan paving dapat dipakai sebagai resapan dan sangat minim perawatannya sehingga dapat bertahan lebih lama.

Tabel 11

**RINCIAN PENGGUNAAN DANA ANGGARAN DAN UPAH TENAGA
KERJA PEMBANGUNAN PAVINGISASI PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN DINOYO**

No.	Uraian	Total	Harga (Rp)	Termin 1	Termin 2	Termin 3	
A. Bahan Material							
1.	Pasir Urug	7 m ³	88.000	264.000	176.000	176.000	
2.	Pasir Pasang	3 m ³	110.000	110.000	110.000	110.000	
3.	Pasir Cor/Beton	1 m ³	140.800	-	140.800	-	
4.	Stenslah/batu pecah tangan 2/3	1 m ³	220.000	110.000	110.000	-	
5.	Paving block segi empat biasa	3.770 bh	1.155	1.738.275	1.299.375	1.316.700	
6.	Semen PC /40 kg	320 kg	1.485	178.200	-	297.000	
7.	Usuk kayu Meranti 5/7 cm	0,01 m ³	4.730.000	41.592,50	-	-	
8.	Papan kayu meranti 2/20 cm	0,01 m ³	6.050.000	39.325	-	-	
9.	Paku usuk	0,25 kg	19.250	4.812,50	-	-	
10.	Air bersih	288 ltr	27,50	3.795	3.825	300	
Total A				2.490.000	1.840.000	1.900.000	6.230.000
B. Upah Tenaga Kerja							
1.	Mandor	3 hari	57.500	57.500	57.500	57.500	
2.	Kepala tukang batu	2 hari	50.000	50.000	50.000	-	
3.	Kepala tukang kayu	-	50.000	-	-	-	
4.	Tukang batu	21 hari	47.500	380.000	332.500	285.000	
5.	Tukang kayu	-	47.500	-	-	-	
6.	Pekerja biasa	56 hari	37.500	862.500	600.000	637.500	
Total B				1.350.000	1.040.000	980.000	3.370.000
Jumlah						9.600.000	
Total Anggaran						9.600.000	

Sumber: Laporan Hasil Kegiatan Prorgam Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan Dinoyo 2012

Dari tabel 11 dapat diketahui bahwa pada bulan Desember 2012 Pokmas Rajawali membeli bahan-bahan material sebesar Rp. 6.230.000,00. Sedangkan untuk upah 6 tenaga kerja totalnya sebesar Rp. 3.370.000,00 dan jumlah total seluruhnya adalah Rp. 9.600.000,00.

Menurut Sekretaris Lurah kelurahan Dinoyo dalam wawancara langsung pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 menyatakan bahwa:

“Pembelanjaan bahan bangunan maupun pemberian upah kepada warga oleh Pokmas Kanjuruhan jumlahnya sudah sesuai dengan anggaran dana yang diberikan, jadi tidak ada defisit maupun kelebihan dana. Hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan dana bantuan pemerintah oleh pihak kelurahan maupun warga itu sendiri”.

7) Pokmas Sekar Jaya

Kondisi perekonomian pada masa kini yang semakin meningkat, mendorong untuk diimbangi dengan kebutuhan sarana dan prasarananya. Dengan demikian dapat memperlancar sirkulasi perekonomian disekitarnya. Melihat kondisi sarana prasarana yang ada di RW VI, terutama akses jalan sebagai penghubung dari satu tempat ke tempat lain, adalah salah satu alasan untuk meningkatkan kondisinya, diantaranya jalan yang berada di Dinoyo Permai Timur, dimana kondisi yang sudah rusak dan tidak terawat, untuk menggantinya dari jalan aspal menjadi jalan paving dengan alasan bahwa jalan paving sangat minim perawatannya sehingga dapat bertahan lebih lama dan juga dapat sebagai akses alternative.

Tabel 12

**RINCIAN PENGGUNAAN DANA ANGGARAN DAN UPAH TENAGA
KERJA PEMBANGUNAN PAVINGISASI PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN DINOYO**

No.	Uraian	Total	Harga (Rp)	Termin 1	Termin 2	Termin 3	
A. Bahan Material							
1.	Pasir Urug	77 m ³	88.000	2.728.000	2.024.000	2.024.000	
2.	Pasir Pasang	33 m ³	110.000	1.430.000	1.100.000	990.000	
3.	Pasir Cor/Beton	5,5 m ³	140.800	140.800	281.600	352.000	
4.	Stenslah/batu pecah tangan 2/3	7 m ³	220.000	660.000	440.000	440.000	
5.	Paving block segi empat biasa	41.220 bh	1.155	19.602.000	14.648.040	14.719.320	
6.	Semen PC /40 kg	2.263 kg	1.485	1.351.350	1.009.800	999.405	
7.	Usuk kayu Meranti 5/7 cm	0,01 m ³	4.730.000	44.397,50	-	-	
8.	Papan kayu meranti 2/20 cm	0,01 m ³	6.050.000	36.300	-	-	
9.	Paku usuk	0,25 kg	19.250	4.812,50	-	-	
10.	Air bersih	1.970 ltr	27,50	19.840	9.060	25.275	
Total A				26.017.500	19.512.500	19.550.000	65.080.000
B. Upah Tenaga Kerja							
1.	Mandor	3 hari	57.500	632.500	460.000	517.500	
2.	Kepala tukang batu	2 hari	50.000	450.000	350.000	350.000	
3.	Kepala tukang kayu	-	50.000	-	-	-	
4.	Tukang batu	21 hari	47.500	4.417.500	3.325.000	3.230.000	
5.	Tukang kayu	-	47.500	-	-	-	
6.	Pekerja biasa	56 hari	37.500	8.962.500	6.712.500	6.712.500	
Total B				14.462.500	10.847.500	10.810.000	36.120.000
Jumlah						101.200.000	
Total Anggaran						101.200.000	

Sumber: Laporan Hasil Kegiatan Prorgam Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan Dinoyo 2012

Dari tabel 12 dapat diketahui bahwa pada bulan Desember 2012 Pokmas Rajawali membeli bahan-bahan material sebesar Rp. 65.080.000,00. Sedangkan untuk upah 36 tenaga kerja totalnya sebesar Rp. 36.120.000,00 dan jumlah total seluruhnya adalah Rp. 101.200.000,00.

Menurut Sekretaris Lurah kelurahan Dinoyo dalam wawancara langsung pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 menyatakan bahwa:

“Pembelanjaan bahan bangunan maupun pemberian upah kepada warga oleh Pokmas Sekar Jaya jumlahnya sudah sesuai dengan anggaran dana yang diberikan, jadi tidak ada defisit maupun kelebihan dana. Hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan dana bantuan pemerintah oleh pihak kelurahan maupun warga itu sendiri”.

8) Pokmas Sunan Kalijaga

Kondisi perekonomian pada masa kini yang semakin meningkat, mendorong untuk diimbangi dengan kebutuhan sarana dan prasarananya. Dengan demikian dapat memperlancar sirkulasi perekonomian disekitarnya. Melihat kondisi sarana prasarana yang ada di RW VII, dimana akses jalan sebagai penghubung dari satu tempat ke tempat lain, adalah salah satu alasan untuk meningkatkan kondisinya, diantaranya jalan yang berada di Jalan Simpang Sunan Kalijaga, dimana kondisinya masih dalam bentuk urugan sirtu, jika hujan terjadi becek maka ditingkatkan menjadi jalan paving dengan alasan bahwa jalan paving sangat minim perawatannya sehingga dapat bertahan lebih lama dan juga dapat sebagai akses alternative.

Tabel 13

**RINCIAN PENGGUNAAN DANA ANGGARAN DAN UPAH TENAGA
KERJA PEMBANGUNAN PAVINGISASI PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN DINOYO**

No.	Uraian	Total	Harga (Rp)	Termin 1	Termin 2	Termin 3	
A. Bahan Material							
1.	Pasir Urug	21 m ³	88.000	704.000	528.000	616.000	
2.	Pasir Pasang	9 m ³	110.000	385.000	330.000	275.000	
3.	Pasir Cor/Beton	1 m ³	140.800	70.400	70.400	-	
4.	Stenslah/batu pecah tangan 2/3	1 m ³	220.000	-	220.000	-	
5.	Paving block segi empat biasa	11.421 bh	1.155	5.435.100	3.927.528	4.205.520	
6.	Semen PC /40 kg	420 kg	1.485	249.480	178.200	196.020	
7.	Usuk kayu Meranti 5/7 cm	0,01 m ³	4.730.000	59.679,50	-	-	
8.	Papan kayu meranti 2/20 cm	0,01 m ³	6.050.000	42.350	-	-	
9.	Paku usuk	0,25 kg	19.250	4.812,50	-	-	
10.	Air bersih	364 ltr	27,50	4.178	3.372	2.460	
Total A				6.955.000	5.257.500	5.295.000	17.507.500
B. Upah Tenaga Kerja							
1.	Mandor	7 hari	57.500	172.500	115.000	115.000	
2.	Kepala tukang batu	7 hari	50.000	150.000	100.000	100.000	
3.	Kepala tukang kayu	-	50.000	-	-	-	
4.	Tukang batu	64 hari	47.500	1.235.000	902.500	902.500	
5.	Tukang kayu	-	47.500	-	-	-	
6.	Pekerja biasa	152 hari	37.500	2.287.500	1.725.000	1.687.500	
Total B				3.845.000	2.842.500	2.805.000	9.492.500
Jumlah						27.000.000	
Total Anggaran						27.000.000	

Sumber: Laporan Hasil Kegiatan Prorgam Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan Dinoyo 2012

Dari tabel 13 dapat diketahui bahwa pada bulan Desember 2012 Pokmas Rajawali membeli bahan-bahan material sebesar Rp. 17.507.500,00. Sedangkan untuk upah 10 tenaga kerja totalnya sebesar Rp. 9.492.500,00 dan jumlah total seluruhnya adalah Rp. 27.000.000,00.

Menurut Sekretaris Lurah kelurahan Dinoyo dalam wawancara langsung pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 menyatakan bahwa:

“Pembelanjaan bahan bangunan maupun pemberian upah kepada warga oleh Pokmas Sunan Kalijaga jumlahnya sudah sesuai dengan anggaran dana yang diberikan, jadi tidak ada defisit maupun kelebihan dana. Hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan dana bantuan pemerintah oleh pihak kelurahan maupun warga itu sendiri”.

b. Pembangunan Gorong-gorong

Kegiatan pembangunan gorong-gorong / saluran irigasi di kelurahan Dinoyo tepatnya dilaksanakan oleh 1 Pokmas yaitu Pokmas Rukun Jaya yang beralamatkan di RT. 06 & 07 RW IV. Anggaran dana yang diberikan pemerintah untuk pembangunan saluran gorong-gorong adalah sebesar 23.450.000 rupiah. Volume wilayah yang akan dibangun saluran gorong-gorong adalah 80 M². Berikut adalah perincian dana anggaran APBD dalam pembangunan gorong-gorong / saluran irigasi melalui Program Pemberdayaan Masyarakat:

Tabel 14

**RINCIAN PENGGUNAAN DANA ANGGARAN DAN UPAH TENAGA
KERJA PEMBANGUNAN GORONG-GORONG PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DINOYO**

No.	Uraian	Total	Harga (Rp)	Termin 1	Termin 2	Termin 3	
A. Bahan Material							
1.	Pasir Urug	10 m ³	88.000	352.000	352.000	176.000	
2.	Pasir Pasang	5 m ³	110.000	220.000	220.000	110.000	
3.	Pasir Cor/Beton	4 m ³	140.800	140.800	281.600	140.800	
4.	Stenslah/batu pecah tangan 2/3	0,5 m ³	220.000	110.000	-	-	
5.	Batu pecah mesin 2/3	2,5 cm	225.500	225.500	225.500	112.750	
6.	Batu bata merah kelas 1	6620 bh	550	1.468.500	1.281.500	919.600	
7.	Paving stone abu-abu tebal 8 cm KW 1	810 bh	1.188	386.100	356.400	219.780	
8.	Semen /PC 40 kg	1.940 kg	1.485	1.752.300	594.000	2.019.600	
9.	Buis beton dia 30 cm	88 bh	45.100	1.578.500	1.578.500	811.800	
10.	Usuk kayu meranti 5/7 cm	0,01 m ³	4.730.000	69.570	-	-	
11.	Papan kayu meranti 2/20 cm	0,01 m ³	6.050.000	54.450	-	-	
12.	Besi beton polos	78 kg	9.900	306.900	-	465.300	
13.	Paku kayu segala ukuran	0,50 kg	19.250	9.625	-	-	
14.	Air bersih	750 ltr	27,50	10.755	5.500	4.370	
Total A				6.685.000	4.895.000	4.980.000	16.560.000
B. Upah Tenaga Kerja							
1.	Mandor	6 hari	57.500	115.000	115.000	115.000	
2.	Kepala tukang batu	3 hari	50.000	50.000	50.000	50.000	
3.	Kepala tukang kayu	-	50.000	-	-	-	
4.	Tukang batu	32 hari	47.500	617.500	475.000	427.500	
5.	Tukang kayu	-	47.500	-	-	-	
6.	Pekerja biasa	130 hari	37.500	1.912.500	1.500.000	1.462.500	
Total B				2.695.000	2.140.000	2.055.000	6.890.000
Jumlah							23.450.000
Total Anggaran							23.450.000

Sumber: Laporan Hasil Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan Dinoyo 2012

Dari tabel 14 dapat diketahui bahwa pada bulan Desember 2012 Pokmas Rajawali membeli bahan-bahan material sebesar Rp. 16.560.000,00. Sedangkan untuk upah 10 tenaga kerja totalnya sebesar Rp. 6.890.000,00 dan jumlah total seluruhnya adalah Rp. 23.450.000,00. Apabila dicocokkan dengan dana anggaran yang diberikan oleh kelurahan maka jumlahnya sesuai dan tidak ada defisit maupun kelebihan dana.

Tujuan dan manfaat pembangunan gorong-gorong / saluran irigasi adalah untuk mencegah terjadinya banjir yang sering terjadi wilayah RW IV serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Melihat kondisi sarana prasarana yang ada di RW IV, dimana jika hujan turun akan terjadi genangan dikarenakan kondisi saluran yang sudah tidak mencukupi lagi kapasitasnya, menjadi alasan untuk melakukan perbaikan dan perawatan terhadap saluran yang sudah ada maupun yang belum ada.

Dengan seringnya terjadi banjir disekitar Jalan MT Haryono VI-C, menjadikan alasan untuk melakukan perbaikan dan penambahan saluran guna mengatasi banjir yang sering terjadi. Adapun di Jalan Gajayana I, dilakukan perbaikan dan perawatan dengan pemasangan saluran buis beton 30 cm guna menghindari banjir dapat dapat memenuhi pembuangan limbah rumah tangga. Peningkatan kondisi lingkungan menjadi lebih baik merupakan program dari RW IV untuk semua wilayah sehingga terhindar dari banjir dan bersih serta sehat.

Menurut Sekretaris Lurah kelurahan Dinoyo dalam wawancara langsung pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan pembangunan saluran gorong-gorong di kelurahan Dinoyo selain dapat memberdayakan masyarakat agar memperoleh pendapatan tambahan juga menjadi solusi dalam menangani masalah genangan air atau bahkan banjir saat musim hujan tiba”.

Sedangkan menurut Ketua Penanggung Jawab Pokmas melalui wawancara langsung pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 mengatakan:

“Pembangunan gorong-gorong ini membawa dampak positif dimana tadinya wilayah RW IV sering banjir saat musim hujan datang sekarang sudah tertata rapi, maka masyarakat tidak perlu khawatir lagi dengan masalah tersebut. Warga juga sangat antusias dengan adanya pelaksanaan pembangunan di daerahnya karena selain mendapat upah hasil kerja juga membuat jalan di kawasan kelurahan Dinoyo menjadi lebih rapi”.

Pada saat peneliti datang ke lapangan melakukan observasi, peneliti melihat kondisi jalan yang terletak di RT 06 & 07 RW IV kelurahan Dinoyo sudah tertata rapi, dan tidak terlihat adanya genangan air walaupun musim hujan datang. Optimalisasi pelaksanaan pembangunan gorong-gorong di kelurahan Dinoyo sudah berjalan dengan baik.

3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Sebagai Wujud Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo Kota Malang.

a. Faktor Pendukung

Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Dinoyo terutama pembangunan sarana prasarana lingkungan melibatkan banyak pihak sepanjang pelaksanaannya. Salah satu pihak yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan berjalannya program ini adalah peran seluruh ketua RT dan ketua RW yang mana mereka berperan sebagai subyek / pelaku dalam pembangunan lingkungan.

Selain kerjasama antara ketua RT dengan ketua RW, peran pemerintah juga sangat penting dalam pengawasan kinerja warga. Misalkan dengan adanya foto-foto sarana prasarana yang sudah rusak sehingga nantinya dapat dibandingkan hasilnya setelah program ini selesai dan seluruh sarana prasarana lingkungannya sudah diperbaiki.

Menurut Lurah kelurahan Dinoyo dalam wawancara langsung pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 menyatakan bahwa:

“Petugas selalu ada dan mengawasi terlaksananya program pemberdayaan masyarakat terutama pembangunan lingkungan agar dana yang telah diberikan oleh pemerintah dapat tersalurkan dengan semestinya dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama program tersebut berlangsung”.

Program ini juga didukung penuh oleh warga kelurahan Dinoyo. Mereka yang ingin meningkatkan ekonominya rata-rata turut serta pada program

pemberdayaan masyarakat terutama dalam pembangunan sarana prasarana lingkungan yang dilaksanakan di kelurahan Dinoyo. Meskipun masih ada warga yang beranggapan gengsi untuk turun dan ikut serta dalam pelaksanaan program ini.

Menurut Sekretaris kelurahan Dinoyo dalam wawancara langsung pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 mengatakan bahwa:

“Antusias warga yang mau turut serta dalam pembangunan lingkungan ini cukup bagus. Warga terlihat bersungguh-sungguh dalam bekerja. Walaupun tidak semua warga ikut turut serta namun program pemberdayaan masyarakat di kelurahan Dinoyo tetap dapat berjalan dengan optimal”.

Senada dengan pendapat bapak Sekretaris Lurah diatas, pendapat yang sama juga diutarakan Ketua Penanggung Jawab Pokmas kelurahan Dinoyo dalam wawancara langsung pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 yang mengatakan bahwa:

“Warga sudah merasakan dampak yang ada dengan adanya pembangunan sarana prasarana lingkungan. Dampaknya adalah selain lingkungan menjadi lebih rapi dan sarana prasarana yang rusak sudah diperbaiki dan dapat difungsikan kembali, serta upah kerja yang diterima membuat warga menginginkan program tersebut dapat terus dilanjutkan”.

Menurut pengamatan peneliti di lapangan, banyak warga berpendapat bahwa adanya program pemberdayaan masyarakat ini sangat membantu kegiatan warga dan juga mereka mengharapkan untuk adanya program berkelanjutan dari pemberdayaan di kelurahan Dinoyo.

b. Faktor Penghambat

Masyarakat terkadang enggan atau ragu untuk membentuk suatu kelompok-kelompok kerja seperti PKK atau Siskamling dan yang lainnya. Akibatnya warga dari Pokmas sebelah ikut serta dalam pengerjaan pembangunan di Pokmas lainnya, hal tersebut dapat menghambat pembangunan di masing-masing Pokmas. Hal ini terlihat bahwa kelompok masyarakat belum sepenuhnya terbentuk.

Sekretaris kelurahan Dinoyo mengutarakan pendapatnya pada wawancara langsung yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 yaitu:

“Masyarakat kurang mengerti dengan program padat karya yang ada dalam program pemberdayaan masyarakat ini. Dengan pemahaman yang kurang itu maka masyarakat juga sulit membentuk suatu kelompok yang nantinya bisa mempercepat pelaksanaan program ini. Mereka masih gengsi dengan mengikuti program pemberdayaan masyarakat ini, padahal mereka sebenarnya juga mengharapkan upah kerja yang akan diterima bagi warga yang ikut serta”.

Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ini dirasakan kurang maksimal. Kebanyakan generasi muda di kawasan kelurahan Dinoyo banyak yang masih menganggur, dengan adanya hal tersebut pemerintah mengharapkan para pemuda ikut serta dalam pembangunan di lingkungan mereka. Selain untuk keindahan lingkungan mereka, nantinya upah kerja yang diberikan juga dapat membantu perekonomian mereka.

Menurut Lurah kelurahan Dinoyo dalam wawancara langsung pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 menyatakan:

“Warga khususnya pemuda di kelurahan Dinoyo yang bisa berpikiran panjang hanya beberapa orang saja, maka dari itu hanya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali pemuda yang terlibat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, warga yang ikut serta rata-rata mereka juga ikut dalam proyek yang lainnya. Jadi mereka tidak bekerja dalam 1 proyek saja namun juga bekerja di proyek-proyek berikutnya”.

Senada dengan pendapat Lurah Dinoyo diatas, Sekretaris kelurahan Dinoyo juga menyatakan dalam wawancara langsung pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 yaitu:

“Pemuda di kelurahan Dinoyo yang terlibat dalam proses pembangunan hanya sedikit, beberapa dari mereka merasa gengsi karena menjadi tukang atau kuli. Hal inilah yang membuat derajat ekonomi mereka menurun. Padahal upah kerja yang diberikan di pembangunan fisik ini lumayan tinggi”.

Menurut pengamatan penulis melihat keadaan di lapangan saat observasi berlangsung yaitu masyarakat di kelurahan Dinoyo kebanyakan mengenyam pendidikan yang tidak tinggi, mungkin dikarenakan pemikiran yang masih kurang maju dan mereka terkesan gengsi untuk ikut serta dalam pembangunan lingkungan program pemberdayaan masyarakat padahal bisa dilihat kehidupan ekonomi mereka juga belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini menyebabkan terhambatnya pemberdayaan masyarakat di kelurahan Dinoyo.

C. Analisis Data

Setelah penulis menyajikan data dari berbagai aspek Program Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Dinoyo yang didalamnya terdapat berbagai kegiatan khususnya pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, maka selanjutnya dalam penulisan ini disajikan analisis data. Dan pada akhirnya dengan adanya sajian analisis data ini dapat ditarik suatu kesimpulan yang sesungguhnya. Mengenai terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Proses Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Sebagai Wujud Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo Kota Malang.

a. Tahap Sosialisasi

Dalam tahap sosialisasi Program Pemberdayaan Masyarakat menganut 5 (lima) asas dan 6 (enam) prinsip di dalam pelaksanaannya. Kelima asas yang dimaksud adalah: (<http://bapemas.jatimprov.go.id>)

- 1) Kemitraan : Menjalin kerjasama dari seluruh komponen masyarakat yang menunjang pemberdayaan masyarakat melalui berbagai bidang kegiatan.
- 2) Keadilan : Memberikan manfaat yang merata pada seluruh strata sosial kehidupan masyarakat tanpa membedakan suku, ras, dan agama.
- 3) Kesederhanaan : Proses kegiatan yang diselenggarakan untuk masyarakat hendaknya didasarkan pada prosedur dan langkah-langkah yang

sederhana, mudah dipahami dalam hal ketentuan dan aturan baik secara administratif maupun secara teknis.

- 4) Kesetaraan gender : semua laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
- 5) Kejujuran : membuka hati nurani seluruh umat manusia yang terlibat langsung atau tidak langsung untuk mengangkat nilai-nilai positif dalam masyarakat.

Sedangkan keenam prinsip yang ditekankan pada program pemberdayaan masyarakat di kelurahan Dinoyo adalah:

- 1) Desentralisasi : Memberikan kepercayaan kepada masyarakat dalam pengelolaan pembangunan wilayahnya melalui institusi lokal.
- 2) Akuntabilitas : Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara teknis maupun administratif.
- 3) Keberlanjutan : Hasil-hasil kegiatan dapat dilestarikan dan di tumbuh kembangkan oleh masyarakat sendiri melalui wadah institusi masyarakat setempat yang mandiri dan profesional.
- 4) Keterbukaan : Semua kegiatan dari awal yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dari seluruh kegiatan dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan.
- 5) Partisipasi : Seluruh anggota masyarakat berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan seluruh kegiatan.

- 6) Demokrasi : Partisipasi menyeluruh dibangun atas persamaan hak dan kewajiban, berdasarkan kebebasan berkumoul dan mengungkapkan pendapat, dan berpegang teguh bahwa musyawarah sebagai forum pengambil keputusan tertinggi.

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo dimulai dengan tahap sosialisasi yang dilakukan aparatur kelurahan yang bekerja sama dengan LPMK bersama-sama mengundang seluruh tokoh-tokoh masyarakat seperti seluruh ketua RT dan ketua RW di kawasan kelurahan Dinoyo guna membicarakan tentang jumlah anggaran dana yang nantinya akan dibagikan kepada masing-masing Kelompok Masyarakat / Pokmas tergantung dari pengajuan dan kebutuhan Pokmas tersebut.

Selain membicarakan tentang anggaran, masyarakat juga diberikan tambahan informasi mengenai masalah pengelolaan sarana prasarana lingkungan, pengembangan kemampuan organisasi masyarakat dalam pengelolaan sarana prasarana dan pelestarian lingkungan hidup, pengembangan sistem pemantauan oleh masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam, serta pengembangan kapasitas aparat pemerintah dan lembaga masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Sekretaris Lurah Kelurahan Dinoyo bahwa pada tahap sosialisasi program pemberdayaan masyarakat di kelurahan Dinoyo diisi dengan membicarakan masalah anggaran dana serta pembagian sebesar 60% untuk pembangunan fisik dan 40% untuk pelatihan keterampilan non-fisik. Selain pendapat dari Sekretaris Lurah diatas, Bapak Lurah kelurahan

Dinoyo juga menyatakan pendapatnya mengenai pentingnya program pemberdayaan masyarakat tersebut, yaitu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan sosial.

Kedua pendapat diatas membuktikan bahwa tahap sosialisasi di kelurahan Dinoyo sangat sesuai dengan kelima asas dan keenam prinsip Program Pemberdayaan Masyarakat yang sudah dijelaskan diatas. Kelima asas program pemberdayaan masyarakat menjabarkan tentang perlunya menjalin kerjasama yang dirancang secara sederhana agar masyarakat dapat mengerti dan tergugah hatinya untuk mengikuti program yang telah direncanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan gender. Sedangkan keenam prinsip Program Pemberdayaan Masyarakat menjabarkan tentang masyarakat sebagai aktor utama dalam segala kegiatan pembangunan, yaitu mengelola pembangunan wilayah, berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan serta bertanggung jawab terhadap berlangsungnya program pemberdayaan masyarakat.

Penulis dapat menarik kesimpulan yaitu tahap sosialisasi dalam program pemberdayaan masyarakat di kelurahan Dinoyo sudah sesuai dengan asas-asas dan prinsip-prinsip program dan dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat membuktikan bahwa proses sosial sudah terjalin antara aparatur kelurahan Dinoyo dengan masyarakat guna membahas tentang program yang akan mereka jalankan.

b. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan program pemberdayaan masyarakat, para staf kelurahan dan pihak LPMK mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan / Musrenbangkel. Di dalam Musrenbangkel ini peran masyarakat sangat besar dalam memberikan pendapat dan masukan sebelum dilaksanakannya pembangunan di wilayah mereka masing-masing.

Tujuan diadakannya Musrenbangkel adalah untuk merencanakan pembangunan dan menentukan skala prioritas untuk tiap wilayah di kelurahan Dinoyo. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Sekretaris Lurah kelurahan Dinoyo bahwa Musrenbangkel membahas tentang perencanaan pembangunan dan semua anggota atau perwakilan warga yang hadir dapat mengajukan usulan tentang rencana pembangunan dan menentukan skala prioritas yang mana nantinya setiap Pokmas akan mendapat pembagian anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing wilayahnya.

Pendapat dari Sekretaris kelurahan Dinoyo diatas sesuai dengan tulisan Sutoro Eko (2003:18) yang membahas tentang pentingnya partisipasi masyarakat, yaitu:

- 1) Akses, yaitu setiap warga mempunyai kesempatan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan, termasuk dalam pelayanan publik.
- 2) Kontrol, yaitu setiap masyarakat mempunyai hak dan kesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan maupun pengelolaan kebijakan dan keuangan pemerintah.

- 3) Voice (suara), yaitu setiap warga diberikan ruang untuk menyampaikan suaranya dalam proses pemerintahan. Begitu pula pemerintah harus menampung setiap suara yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai dasar pembuatan keputusan.

Setelah merencanakan pembangunan dan menentukan skala prioritas untuk tiap wilayah, agenda kegiatan dari Musrenbangkel dilanjutkan dengan membuat proposal kegiatan yang berisi kegiatan apa saja yang nantinya akan dilaksanakan dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat misalnya pavingisasi atau pembangunan gorong-gorong. Bukan hanya rincian kegiatan saja yang dicantumkan dalam proposal perencanaan namun anggaran dana dan volume / luas wilayah yang akan dibangun juga sudah direncanakan dan dianggarkan secara rinci.

Dapat disimpulkan bahwa dalam proses perencanaan program pemberdayaan masyarakat di kelurahan Dinoyo, pelaksanaan Musrenbangkel yang dihadiri oleh pihak kelurahan, LPMK dan masyarakat sudah sesuai dengan pendapat Sutoro Eko dalam tulisannya yang membahas tentang pentingnya partisipasi masyarakat. Selain itu, dengan diadakannya rapat Musrenbangkel menunjukkan bahwa hubungan antara aparat pemerintah kelurahan Dinoyo dengan masyarakat serta organisasi masyarakat memiliki hubungan yang baik. Hal tersebut dapat membantu kelancaran pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ini nantinya.

c. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo khususnya pembangunan sarana prasarana lingkungan sudah berjalan dengan lancar. Pelaksanaan program dapat rampung sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan dan biaya yang dipergunakan sudah sesuai dengan yang direncanakan pada rapat Musrenbangkel. Ketepatan dalam merampungkan seluruh pekerjaan di masing-masing RW tidak terlepas dari material yang tercukupi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gotong royong.

Kesadaran masyarakat itu tumbuh seiring dengan dibentuknya Kelompok-kelompok Masyarakat / Pokmas yang anggotanya terdiri dari para warga yang wilayahnya akan dibangun. Tugas pokmas adalah menampung aspirasi warga kelurahan, memberikan usul dan saran kepada Lurah tentang penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, menjelaskan kebijakan pemerintah kelurahan kepada warga kelurahan, dan membantu Lurah dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dari proses awal hingga akhir. Dengan adanya pembentukan Pokmas tersebut maka warga akan lebih antusias dalam menuangkan aspirasinya, dan memberikan pendapat untuk kesuksesan pembangunan di wilayah mereka masing-masing. Selain itu, dengan dibentuknya Pokmas di setiap wilayah pembangunan akan meningkatkan swadaya masyarakat. Bantuan yang diberikan bermacam-macam sesuai kemampuan ekonomi yang mereka miliki. Warga dengan tingkat ekonomi menengah ke atas memberikan bantuan berupa uang, sedangkan warga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah memberikan bantuan berupa jasa / tenaga.

Antusiasme warga yang cukup tinggi sangat membantu berjalannya program pemberdayaan masyarakat ini. Para warga dengan sukarela ikut serta melibatkan diri dalam pembangunan lingkungan di wilayah mereka masing-masing. Hal tersebut dikarenakan mereka merasa pembangunan di wilayah kelurahan Dinoyo dirasakan perlu untuk menghadapi gangguan-gangguan di masa depan seperti banjir dan sebagainya.

Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana lingkungan di kelurahan Dinoyo dapat membantu meningkatkan perekonomian warga, hal tersebut dikarenakan upah kerja yang diterima oleh warga yang ikut berpartisipasi sangat tinggi. Sesuai dengan penjelasan Lurah Dinoyo, Sekretaris kelurahan Dinoyo dan Ketua Penanggung Jawab Pokmas kelurahan Dinoyo yang menjelaskan tentang keuntungan-keuntungan yang diperoleh masyarakat dengan ikut berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan fisik. Mereka bertiga sepakat bahwa selain lingkungan yang menjadi indah dan lebih rapi, keuntungan yang akan diberikan kepada warga adalah upah kerja yang tinggi yang nantinya akan sedikit meningkatkan perekonomian mereka.

Senada dengan pendapat dari Lurah Dinoyo, Sekretaris kelurahan Dinoyo dan Ketua Penanggung Jawab Pokmas kelurahan Dinoyo diatas, Ericson (dalam Slamet, 1994:89) mengatakan bahwa partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (implementation stage) dimaksudkan adalah pelibatan seseorang pada tahapan pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Maksudnya adalah masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang atau pun material sebagai salah satu wujud partisipasi pada pekerjaan tersebut.

Jadi kesimpulan yang dapat penulis simpulkan pada pelaksanaan pembangunan sarana prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Dinoyo ini adalah masyarakat sangat terbantu dengan diadakannya program tersebut. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan pendapat Ericson yang intinya mengatakan tentang bentuk partisipasi yang ideal adalah yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaan di lingkungannya sendiri.

d. Tahap Pengawasan

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo tidak dapat dipisahkan dari peran serta masyarakat dalam mensosialisasikan, merencanakan maupun melaksanakan program seperti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan dilibatkannya masyarakat dalam seluruh proses kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan dalam hal produktivitas, kebersamaan, tanggung jawab, dan rasa saling memiliki terhadap lingkungan dan sarana prasarana yang telah mereka bangun bersama-sama.

Manfaat program pemberdayaan masyarakat khususnya pembangunan sarana prasarana fisik ini sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Masyarakat juga berharap adanya program pembangunan berkelanjutan yang tujuannya untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur yang sudah tidak layak dan juga disamping itu untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Tahap terakhir dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh sebuah kelompok yang bernama Tim

Monitoring dan Pengawasan Pekerjaan. Anggota tim ini berjumlah 8 orang, rinciannya adalah 4 orang dari staf kelurahan Dinoyo dan 4 orang dari perwakilan LPMK Dinoyo serta dibantu oleh masyarakat sekitar. Tugas dari tim ini adalah memeriksa dan mengevaluasi pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Selain mengevaluasi tentang hasil pembangunan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan, tim ini juga mengevaluasi tentang perincian dana anggaran dan realisasi dana yang diberikan pemerintah. Tidak ketinggalan, tingkat pemberdayaan masyarakat juga ikut dilaporkan dan dievaluasi.

Proses evaluasi yang dilakukan oleh Tim Monitoring dan Pengawasan Pekerjaan juga dijelaskan oleh Lurah Dinoyo dan Sekretaris kelurahan Dinoyo yang mana pengawasan dan evaluasi sangat diperlukan untuk menyesuaikan antara rencana awal dengan realitas di lapangan. Hal senada juga dikatakan oleh Soekartawi (1990:105) yaitu tahapan monitoring ini penting sekali untuk memandu apakah proyek tersebut sudah sesuai dengan model (blue print) yang telah ditetapkan.

Dapat ditarik kesimpulan hasil pengawasan dan evaluasi dari Program Pemberdayaan Masyarakat membuktikan bahwa hasil yang dicapai dengan perencanaan sudah sesuai apabila dilihat dari segi kesesuaian anggaran dana, dan waktu pelaksanaannya. Masyarakat juga terkena imbas positifnya yaitu lingkungan mereka menjadi lebih indah, lebih rapi dan baru serta kehidupan ekonomi mereka meningkat. Maka dari itu, banyak masyarakat yang menginginkan adanya pembangunan berkelanjutan yang serupa dengan Program Pemberdayaan Masyarakat ini.

2. Hasil Yang Telah Dicapai Dari Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Sebagai Wujud Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo Kota Malang.

a. Pembangunan Pavingisasi

Pembangunan pavingisasi di kelurahan Dinoyo dilaksanakan di 8 Pokmas yang tersebar di 8 wilayah kelurahan Dinoyo. Pembangunan paving sangat dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar yaitu jalan yang dulunya sering tergenang air saat musim penghujan datang sekarang sudah diperbaiki dan menjadi lebih rapi. Hal tersebut meningkatkan kenyamanan warga dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Untuk rincian lokasi, anggaran dana dan volume / luas wilayah kedelapan Pokmas dapat dilihat pada tabel 2. Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa diantara 8 Pokmas yang tersebar di kelurahan Dinoyo, Pokmas Sekar Jaya merupakan Pokmas dengan wilayah kerja paling luas dan anggaran dananya pun yang pali besar diantara Pokmas-pokmas yang lainnya. Sedangkan Pokmas Rajawali merupakan Pokmas dengan wilayah kerja terkecil begitu pula dengan anggaran dana yang diberikan.

Manfaat dari pembangunan pavingisasi dijelaskan oleh Ketua Penanggung Jawab Pokmas yang mana paving sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan warga dan untuk mencegah banjir serta genangan air yang sering terjadi saat musim hujan datang.

Berikut ini rincian anggaran dana dan daftar warga yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan pavingisasi di masing-masing Pokmas:

1) Pokmas Rajawali

Latar belakang diadakannya pembangunan paving pada kawasan RW I adalah kondisi jalan perkampungan masih berupa tanah rabatan dan tidak ada resapan air hujan, sehingga mudah terjadi banjir. Maka dari itu dibutuhkan pembangunan paving agar resapan hujan dapat dimaksimalkan dan tidak terjadi banjir lagi.

Pokmas Rajawali berada di Jalan MT. Haryono RW.01 RT.01 kelurahan Dinoyo Kota Malang. Anggaran dana yang diberikan pemerintah untuk membangun paving di kawasan seluas 49,28 M² tersebut adalah 5.600.000 rupiah. Pemberian anggaran tersebut dibagi dalam 3 termin / tahapan, perinciannya yaitu pemberian Termin 1 sebesar 40%, pemberian Termin 2 sebesar 30%, dan pemberian Termin 3 sebesar 30%.

Untuk kebutuhan pembelian bahan material seperti pasir urug, pasir pasang, pasir cor/beton, stenslah/batu pecah tangan, paving block, semen, usuk kayu meranti, papan kayu meranti, paku usuk dan air bersih pada Termin 1 Pokmas Rajawali menghabiskan dana sekitar Rp. 1.445.000,00. Sedangkan untuk Termin 2 menghabiskan dana sekitar Rp. 1.067.500,00 dan untuk Termin 3 menghabiskan dana sekitar Rp. 1.067.500,00. Apabila dijumlahkan yaitu sebesar Rp. 3.580.000,00.

Antusiasme warga juga ditunjukkan dengan keikutsertaan warga dalam pembangunan paving seperti yang terlihat di tabel 2, dimana 5 warga yang terlibat menghabiskan sekitar 33 hari dalam pembangunan paving di RW I. Pada Termin 1 warga dibayar sebesar Rp. 795.000,00. Pada Termin 2 warga dibayar Rp. 612.500,00 dan pada Termin 3 warga dibayar Rp. 612.500,00. Jadi total upah tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Pokmas Rajawali sebesar Rp. 2.020.000,00. Apabila dijumlahkan dengan anggaran bahan material maka totalnya adalah Rp. 5.600.000,00. Jumlah tersebut sudah sesuai dengan dana anggaran yang diberikan oleh kelurahan maka jumlahnya sesuai dan tidak ada defisit maupun kelebihan dana.

2) Pokmas Bakti Jaya

Latar belakang diadakannya pembangunan paving pada kawasan RW II adalah kondisi jalan perkampungan masih berupa tanah rabatan dan tidak ada resapan air hujan, sehingga mudah terjadi banjir. Maka dari itu dibutuhkan pembangunan paving agar resapan hujan dapat dimaksimalkan dan tidak terjadi banjir lagi.

Pokmas Bakti Jaya berada di Jalan Gajayana 4A, RW.02 RT.02 kelurahan Dinoyo Kota Malang. Anggaran dana yang diberikan pemerintah untuk membangun paving di kawasan seluas 164,60 M² tersebut adalah 19.200.000 rupiah. Pemberian anggaran tersebut dibagi dalam 3 termin / tahapan, perinciannya yaitu pemberian Termin 1 sebesar 40%, pemberian Termin 2 sebesar 30%, dan pemberian Termin 3 sebesar 30%.

Untuk kebutuhan pembelian bahan material seperti pasir urug, pasir pasang, pasir cor/beton, stenslah/batu pecah tangan, paving block, semen, usuk kayu meranti, papan kayu meranti, paku usuk dan air bersih pada Termin 1 Pokmas Bakti Jaya menghabiskan dana sekitar Rp. 5.045.000,00. Sedangkan untuk Termin 2 menghabiskan dana sekitar Rp. 3.787.500,00 dan untuk Termin 3 menghabiskan dana sekitar Rp. 3.760.000,00. Apabila dijumlahkan yaitu sebesar Rp. 12.592.500,00.

Antusiasme warga juga ditunjukkan dengan keikutsertaan warga dalam pembangunan paving seperti yang terlihat di tabel 2, dimana 9 warga yang terlibat menghabiskan sekitar 110 hari dalam pembangunan paving di RW II. Pada Termin 1 warga dibayar sebesar Rp. 2.635.000,00. Pada Termin 2 warga dibayar Rp. 1.972.500,00 dan pada Termin 3 warga dibayar Rp. 2.000.000,00. Jadi total upah tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Pokmas Bakti Jaya sebesar Rp. 6.607.500,00. Apabila dijumlahkan dengan anggaran bahan material maka totalnya adalah Rp. 19.200.000,00. Jumlah tersebut sudah sesuai dengan dana anggaran yang diberikan oleh kelurahan maka jumlahnya sesuai dan tidak ada defisit maupun kelebihan dana.

3) Pokmas Dinamika I

Latar belakang diadakannya pembangunan paving pada kawasan RW III adalah kondisi jalan perkampungan masih berupa tanah rabatan dan tidak ada resapan air hujan, sehingga mudah terjadi banjir. Maka dari itu dibutuhkan

pembangunan paving agar resapan hujan dapat dimaksimalkan dan tidak terjadi banjir lagi.

Pokmas Dinamika I berada di Jalan MT. Haryono XV, RW.03 RT.04 kelurahan Dinoyo Kota Malang. Anggaran dana yang diberikan pemerintah untuk membangun paving di kawasan seluas 586,80 M² tersebut adalah 64.000.000 rupiah. Pemberian anggaran tersebut dibagi dalam 3 termin / tahapan, perinciannya yaitu pemberian Termin 1 sebesar 40%, pemberian Termin 2 sebesar 30%, dan pemberian Termin 3 sebesar 30%.

Untuk kebutuhan pembelian bahan material seperti pasir urug, pasir pasang, pasir cor/beton, stenslah/batu pecah tangan, paving block, semen, usuk kayu meranti, papan kayu meranti, paku usuk dan air bersih pada Termin 1 Pokmas Dinamika I menghabiskan dana sekitar Rp. 16.395.000,00. Sedangkan untuk Termin 2 menghabiskan dana sekitar Rp. 12.260.000,00 dan untuk Termin 3 menghabiskan dana sekitar Rp. 12.205.000,00. Apabila dijumlahkan yaitu sebesar Rp. 40.860.000,00.

Antusiasme warga juga ditunjukkan dengan keikutsertaan warga dalam pembangunan paving seperti yang terlihat di tabel 2, dimana 24 warga yang terlibat menghabiskan sekitar 382 hari dalam pembangunan paving di RW III. Pada Termin 1 warga dibayar sebesar Rp. 9.205.000,00. Pada Termin 2 warga dibayar Rp. 6.940.000,00 dan pada Termin 3 warga dibayar Rp. 6.995.000,00. Jadi total upah tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Pokmas Dinamika I sebesar Rp. 23.140.000,00. Apabila dijumlahkan dengan anggaran bahan material maka

totalnya adalah Rp. 64.000.000,00. Jumlah tersebut sudah sesuai dengan dana anggaran yang diberikan oleh kelurahan maka jumlahnya sesuai dan tidak ada defisit maupun kelebihan dana.

4) Pokmas Dinamika II

Latar belakang diadakannya pembangunan paving pada kawasan RW III adalah kondisi jalan perkampungan masih berupa tanah rabatan dan tidak ada resapan air hujan, sehingga mudah terjadi banjir. Maka dari itu dibutuhkan pembangunan paving agar resapan hujan dapat dimaksimalkan dan tidak terjadi banjir lagi.

Pokmas Dinamika II berada di Jalan MT. Haryono IX-F, RW.03 RT.02 kelurahan Dinoyo Kota Malang. Anggaran dana yang diberikan pemerintah untuk membangun paving di kawasan seluas 97,44 M² tersebut adalah 11.200.000 rupiah. Pemberian anggaran tersebut dibagi dalam 3 termin / tahapan, perinciannya yaitu pemberian Termin 1 sebesar 40%, pemberian Termin 2 sebesar 30%, dan pemberian Termin 3 sebesar 30%.

Untuk kebutuhan pembelian bahan material seperti pasir urug, pasir pasang, pasir cor/beton, stenslah/batu pecah tangan, paving block, semen, usuk kayu meranti, papan kayu meranti, paku usuk dan air bersih pada Termin 1 Pokmas Dinamika II menghabiskan dana sekitar Rp. 2.922.500,00. Sedangkan untuk Termin 2 menghabiskan dana sekitar Rp. 2.272.500,00 dan untuk Termin 3 menghabiskan dana sekitar Rp. 2.057.500,00. Apabila dijumlahkan yaitu sebesar Rp. 7.252.500,00.

Antusiasme warga juga ditunjukkan dengan keikutsertaan warga dalam pembangunan paving seperti yang terlihat di tabel 2, dimana 6 warga yang terlibat menghabiskan sekitar 382 hari dalam pembangunan paving di RW III. Pada Termin 1 warga dibayar sebesar Rp. 1.557.500,00. Pada Termin 2 warga dibayar Rp. 1.078.500,00 dan pada Termin 3 warga dibayar Rp. 1.302.500,00. Jadi total upah tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Pokmas Dinamika II sebesar Rp. 3.947.500,00. Apabila dijumlahkan dengan anggaran bahan material maka totalnya adalah Rp. 11.200.000,00. Jumlah tersebut sudah sesuai dengan dana anggaran yang diberikan oleh kelurahan maka jumlahnya sesuai dan tidak ada defisit maupun kelebihan dana.

5) Pokmas Dinamika III

Latar belakang diadakannya pembangunan paving pada kawasan RW III adalah kondisi jalan perkampungan masih berupa tanah rabatan dan tidak ada resapan air hujan, sehingga mudah terjadi banjir. Maka dari itu dibutuhkan pembangunan paving agar resapan hujan dapat dimaksimalkan dan tidak terjadi banjir lagi.

Pokmas Dinamika III berada di Jalan MT. Haryono IX-B, RW.03 RT.06 kelurahan Dinoyo Kota Malang. Anggaran dana yang diberikan pemerintah untuk membangun paving di kawasan seluas 146,25 M² tersebut adalah 15.200.000 rupiah. Pemberian anggaran tersebut dibagi dalam 3 termin / tahapan, perinciannya yaitu pemberian Termin 1 sebesar 40%, pemberian Termin 2 sebesar 30%, dan pemberian Termin 3 sebesar 30%.

Untuk kebutuhan pembelian bahan material seperti pasir urug, pasir pasang, pasir cor/beton, stenslah/batu pecah tangan, paving block, semen, usuk kayu meranti, papan kayu meranti, paku usuk dan air bersih pada Termin 1 Pokmas Dinamika II menghabiskan dana sekitar Rp. 3.925.000,00. Sedangkan untuk Termin 2 menghabiskan dana sekitar Rp. 2.805.000,00 dan untuk Termin 3 menghabiskan dana sekitar Rp. 3.052.500,00. Apabila dijumlahkan yaitu sebesar Rp. 9.782.500,00.

Antusiasme warga juga ditunjukkan dengan keikutsertaan warga dalam pembangunan paving seperti yang terlihat di tabel 2, dimana 8 warga yang terlibat menghabiskan sekitar 382 hari dalam pembangunan paving di RW III. Pada Termin 1 warga dibayar sebesar Rp. 2.155.000,00. Pada Termin 2 warga dibayar Rp. 1.755.000,00 dan pada Termin 3 warga dibayar Rp. 1.507.500,00. Jadi total upah tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Pokmas Dinamika III sebesar Rp. 5.417.500,00. Apabila dijumlahkan dengan anggaran bahan material maka totalnya adalah Rp. 15.200.000,00. Jumlah tersebut sudah sesuai dengan dana anggaran yang diberikan oleh kelurahan maka jumlahnya sesuai dan tidak ada defisit maupun kelebihan dana.

6) Pokmas Kanjuruhan

Latar belakang diadakannya pembangunan paving pada kawasan RW V adalah kondisi jalan perkampungan masih berupa tanah rabatan dan tidak ada resapan air hujan, sehingga mudah terjadi banjir. Maka dari itu dibutuhkan

pembangunan paving agar resapan hujan dapat dimaksimalkan dan tidak terjadi banjir lagi.

Pokmas Kanjuruhan berada di Jalan MT. Haryono X, RW.05 RT.04 kelurahan Dinoyo Kota Malang. Anggaran dana yang diberikan pemerintah untuk membangun paving di kawasan seluas 83,75 M² tersebut adalah 9.600.000 rupiah. Pemberian anggaran tersebut dibagi dalam 3 termin / tahapan, perinciannya yaitu pemberian Termin 1 sebesar 40%, pemberian Termin 2 sebesar 30%, dan pemberian Termin 3 sebesar 30%.

Untuk kebutuhan pembelian bahan material seperti pasir urug, pasir pasang, pasir cor/beton, stenslah/batu pecah tangan, paving block, semen, usuk kayu meranti, papan kayu meranti, paku usuk dan air bersih pada Termin 1 Pokmas Kanjuruhan menghabiskan dana sekitar Rp. 2.490.000,00. Sedangkan untuk Termin 2 menghabiskan dana sekitar Rp. 1.840.000,00 dan untuk Termin 3 menghabiskan dana sekitar Rp. 1.900.000,00. Apabila dijumlahkan yaitu sebesar Rp. 6.230.000,00.

Antusiasme warga juga ditunjukkan dengan keikutsertaan warga dalam pembangunan paving seperti yang terlihat di tabel 2, dimana 6 warga yang terlibat menghabiskan sekitar 56 hari dalam pembangunan paving di RW III. Pada Termin 1 warga dibayar sebesar Rp. 1.350.000,00. Pada Termin 2 warga dibayar Rp. 1.040.000,00 dan pada Termin 3 warga dibayar Rp. 980.000,00. Jadi total upah tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Pokmas Kanjuruhan sebesar Rp. 3.370.000,00. Apabila dijumlahkan dengan anggaran bahan material maka totalnya adalah Rp.

9.600.000,00. Jumlah tersebut sudah sesuai dengan dana anggaran yang diberikan oleh kelurahan maka jumlahnya sesuai dan tidak ada defisit maupun kelebihan dana.

7) Pokmas Sekar Jaya

Latar belakang diadakannya pembangunan paving pada kawasan RW VI adalah kondisi jalan perkampungan masih berupa tanah rabatan dan tidak ada resapan air hujan, sehingga mudah terjadi banjir. Maka dari itu dibutuhkan pembangunan paving agar resapan hujan dapat dimaksimalkan dan tidak terjadi banjir lagi.

Pokmas Sekar Jaya berada di Jalan MT. Haryono 19, RW.03 RT.03 kelurahan Dinoyo Kota Malang. Anggaran dana yang diberikan pemerintah untuk membangun paving di kawasan seluas 916,00 M² tersebut adalah 101.200.000 rupiah. Pemberian anggaran tersebut dibagi dalam 3 termin / tahapan, perinciannya yaitu pemberian Termin 1 sebesar 40%, pemberian Termin 2 sebesar 30%, dan pemberian Termin 3 sebesar 30%.

Untuk kebutuhan pembelian bahan material seperti pasir urug, pasir pasang, pasir cor/beton, stenslah/batu pecah tangan, paving block, semen, usuk kayu meranti, papan kayu meranti, paku usuk dan air bersih pada Termin 1 Pokmas Sekar Jaya menghabiskan dana sekitar Rp. 26.017.500,00. Sedangkan untuk Termin 2 menghabiskan dana sekitar Rp. 19.512.500,00 dan untuk Termin 3 menghabiskan dana sekitar Rp. 19.550.000,00. Apabila dijumlahkan yaitu sebesar Rp. 65.080.000,00.

Antusiasme warga juga ditunjukkan dengan keikutsertaan warga dalam pembangunan paving seperti yang terlihat di tabel 2, dimana 36 warga yang terlibat menghabiskan sekitar 56 hari dalam pembangunan paving di RW VI. Pada Termin 1 warga dibayar sebesar Rp. 14.462.500,00. Pada Termin 2 warga dibayar Rp. 10.847.500,00 dan pada Termin 3 warga dibayar Rp. 10.810.000,00. Jadi total upah tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Pokmas Sekar Jaya sebesar Rp. 36.120.000,00. Apabila dijumlahkan dengan anggaran bahan material maka totalnya adalah Rp. 101.200.000,00. Jumlah tersebut sudah sesuai dengan dana anggaran yang diberikan oleh kelurahan maka jumlahnya sesuai dan tidak ada defisit maupun kelebihan dana.

8) Pokmas Sunan Kalijaga

Latar belakang diadakannya pembangunan paving pada kawasan RW VII adalah kondisi jalan perkampungan masih berupa tanah rabatan dan tidak ada resapan air hujan, sehingga mudah terjadi banjir. Maka dari itu dibutuhkan pembangunan paving agar resapan hujan dapat dimaksimalkan dan tidak terjadi banjir lagi.

Pokmas Sunan Kalijaga berada di Jalan Jalan Sunan Kalijaga RW.07 RT.02 kelurahan Dinoyo Kota Malang. Anggaran dana yang diberikan pemerintah untuk membangun paving di kawasan seluas 270,00 M² tersebut adalah 27.000.000 rupiah. Pemberian anggaran tersebut dibagi dalam 3 termin / tahapan, perinciannya yaitu pemberian Termin 1 sebesar 40%, pemberian Termin 2 sebesar 30%, dan pemberian Termin 3 sebesar 30%.

Untuk kebutuhan pembelian bahan material seperti pasir urug, pasir pasang, pasir cor/beton, stenslah/batu pecah tangan, paving block, semen, usuk kayu meranti, papan kayu meranti, paku usuk dan air bersih pada Termin 1 Pokmas Sunan Kalijaga menghabiskan dana sekitar Rp. 6.955.000,00. Sedangkan untuk Termin 2 menghabiskan dana sekitar Rp. 5.257.500,00 dan untuk Termin 3 menghabiskan dana sekitar Rp. 5.295.000,00. Apabila dijumlahkan yaitu sebesar Rp. 17.507.500,00.

Antusiasme warga juga ditunjukkan dengan keikutsertaan warga dalam pembangunan paving seperti yang terlihat di tabel 2, dimana 10 warga yang terlibat menghabiskan sekitar 152 hari dalam pembangunan paving di RW VII. Pada Termin 1 warga dibayar sebesar Rp. 3.845.000,00. Pada Termin 2 warga dibayar Rp. 2.842.500,00 dan pada Termin 3 warga dibayar Rp. 2.805.000,00. Jadi total upah tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Pokmas Sekar Jaya sebesar Rp. 9.492.500,00. Apabila dijumlahkan dengan anggaran bahan material maka totalnya adalah Rp. 27.000.000,00. Jumlah tersebut sudah sesuai dengan dana anggaran yang diberikan oleh kelurahan maka jumlahnya sesuai dan tidak ada defisit maupun kelebihan dana.

b. Pembangunan Gorong-gorong

Kegiatan pembangunan gorong-gorong ini dilaksanakan oleh Pokmas Rukun Jaya yang berada di RT. 06 & 07 RW IV kelurahan Dinoyo Kota Malang. Latar belakang diadakannya pembangunan gorong-gorong disana adalah karena seringnya terjadi banjir di sekitar Jalan MT Haryono VI-C dikarenakan kondisi

saluran yang sudah tidak mencukupi lagi kapasitasnya. Selain itu masyarakat juga dapat memperoleh upah kerja bila ikut serta dalam pembangunan gorong-gorong ini.

Gorong-gorong / saluran drainase juga perlu dirancang dengan baik agar salurah pembuangan limbah menjadi lancar. Cara yang bisa dilakukan adalah memasang saluran buis beton 30 cm guna menghindari banjir yang dapat memenuhi dan menyumbat pembuangan limbah rumah tangga.

Penjelasan Sekretaris kelurahan Dinoyo dan Ketua Penanggung Jawab Pokmas kelurahan Dinoyo mengenai manfaat pembangunan gorong-gorong sudah cukup jelas, yaitu agar masyarakat tidak perlu khawatir lagi apabila musim hujan tiba, karena sekarang sudah dibangun saluran drainase yang dapat menyalurkan air hujan dan limbah-limbah rumah tangga dengan lancar.

Pelaksanaan pembangunan oleh Pokmas Rukun Jaya membutuhkan Anggaran dana sebesar 23.450.000 rupiah untuk membangun gorong-gorong seluas 80 M². Pemberian anggaran tersebut dibagi dalam 3 termin / tahapan, perinciannya yaitu pemberian Termin 1 sebesar 40%, pemberian Termin 2 sebesar 30%, dan pemberian Termin 3 sebesar 30%.

Untuk kebutuhan pembelian bahan material seperti pasir urug, pasir pasang, pasir cor/beton, stenslah/batu pecah tangan, batu pecah mesin, batu bata merah, paving stone, semen, buis beton, usuk kayu meranti, papan kayu meranti, besi beton, paku kayu dan air bersih pada Termin 1 Pokmas Rukun Jaya menghabiskan dana sekitar Rp. 6.685.000,00. Sedangkan untuk Termin 2

menghabiskan dana sekitar Rp. 4.895.000,00 dan untuk Termin 3 menghabiskan dana sekitar Rp. 4.980.000,00. Apabila dijumlahkan yaitu sebesar Rp. 16.560.000,00.

Antusiasme warga juga ditunjukkan dengan keikutsertaan warga dalam pembangunan gorong-gorong seperti yang terlihat di tabel 2, dimana 10 warga yang terlibat menghabiskan sekitar 130 hari dalam pembangunan gorong-gorong di RT. 06 & 07 RW IV. Pada Termin 1 warga dibayar sebesar Rp. 2.695.000,00. Pada Termin 2 warga dibayar Rp. 2.140.000,00 dan pada Termin 3 warga dibayar Rp. 2.055.000,00. Jadi total upah tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Pokmas Rukun Jaya sebesar Rp. 6.890.000,00. Apabila dijumlahkan dengan anggaran bahan material maka totalnya adalah Rp. 23.450.000,00. Jumlah tersebut sudah sesuai dengan dana anggaran yang diberikan oleh kelurahan maka jumlahnya sesuai dan tidak ada defisit maupun kelebihan dana.

3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Sebagai Wujud Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo Kota Malang.

a. Faktor Pendukung

Partisipasi masyarakat merupakan faktor terpenting bagi kesuksesan program pemberdayaan masyarakat di kelurahan Dinoyo. Antusiasme warga masyarakat ditunjukkan dengan kesediaan warga mengikuti seluruh proses pembangunan dari awal yaitu perencanaan, lalu ke pelaksanaan program sampai pada tahap pengawasan. Memang masih ada warga yang beranggapan gengsi

untuk berpartisipasi dalam pembangunan dikarenakan pekerjaan yang dikerjakan adalah pekerjaan kuli. Akan tetapi masih banyak warga yang antusias dan mau ikut serta dalam pembangunan di lingkungan mereka.

Pemberian upah kerja kepada warga yang ikut membangun adalah salah satu faktor yang membuat warga tertarik untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan mendapatkan upah kerja tersebut maka mereka bisa menambah penghasilan mereka dan sedikit meningkatkan perekonomian keluarganya.

Menurut pengamatan penulis, saat ini banyak pemuda yang tinggal di kelurahan Dinoyo, akan tetapi mereka enggan untuk terlibat dalam pembangunan lingkungan ini. Maka dari itu, warga yang ikut berpartisipasi kebanyakan adalah bapak-bapak yang sudah berumah tangga yang merasa bahwa kondisi ekonominya masih kurang.

Mengenai hal di atas Sekretaris kelurahan Dinoyo dan Ketua Penanggungjawab Pokmas kelurahan Dinoyo mengatakan hal yang sama yaitu warga sangat antusias dan mendukung diadakannya program pemberdayaan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Lingkungan yang menjadi rapi dan bersih serta pemberian upah kerja yang tinggi merupakan salah satu faktor masyarakat sangat antusias dengan program tersebut.

Kesimpulan yang dapat penulis berikan adalah masyarakat merasa sangat terbantu sekali dengan diadakannya pembangunan sarana prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Dinoyo. Para warga

yang ikut terlibat adalah mereka yang peduli terhadap lingkungan tempat tinggalnya dan mereka yang membutuhkan upah tambahan untuk menghidupi keluarganya.

b. Faktor Penghambat

Pada tahapan awal perencanaan program pemberdayaan masyarakat, diadakan rapat Musrenbangkel yang salah satu agendanya adalah membentuk kelompok-kelompok masyarakat / Pokmas yang nantinya akan diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan pembangunan di wilayah yang sudah ditentukan. Akan tetapi, masih ada warga yang belum bisa membaur dengan warga lain di Pokmasnya.

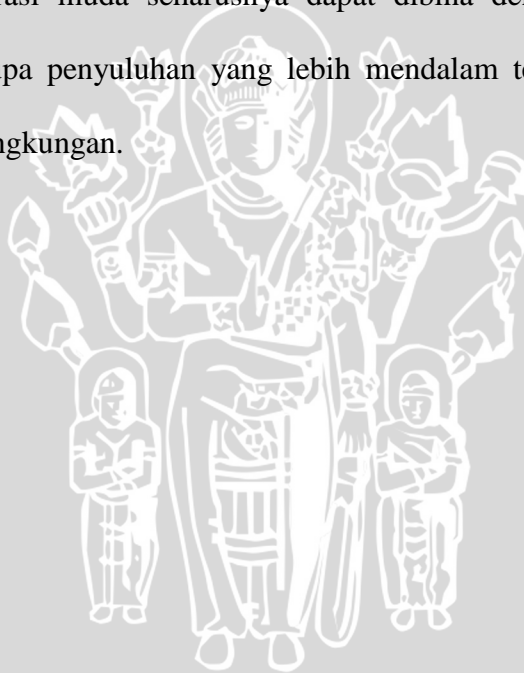
Hal tersebut senada dengan pendapat Bapak Sekretaris Lurah Dinoyo yang menyatakan bahwa ketidakpahaman warga terhadap program padat karya yang mengharuskan membentuk kelompok masyarakat membuat warga bingung dan akhirnya tidak bisa membaur dengan warga lainnya.

Masalah lain yang sering muncul dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ini adalah kurangnya minat anak-anak muda untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan tempat tinggalnya. Kebanyakan dari mereka merasa gengsi atau malu karena harus melakukan pekerjaan seperti tukang atau kuli. Padahal nantinya upah kerja yang diberikan pemerintah dapat membantu perekonomian keluarganya.

Lurah Dinoyo dan Sekretaris kelurahan Dinoyo sepakat menyatakan bahwa generasi muda harus berpikiran jauh kedepan, karena tindakan yang

dilakukannya juga nantinya mereka sendiri yang menikmati. Selain itu mereka juga bisa mendapatkan upah kerja yang bisa membantu perekonomian mereka.

Kesimpulan yang dapat penulis berikan adalah sebagian warga masih bingung dengan adanya kelompok-kelompok masyarakat yang menurut penulis dikarenakan proses sosialisasi yang kurang bisa dimengerti warga. Selain itu tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap pola pikir warga dalam menerima informasi tentang program pemberdayaan masyarakat ini. Selain itu, kurangnya antusiasme dari generasi muda seharusnya dapat dibina dengan diadakannya proses sosialisasi berupa penyuluhan yang lebih mendalam tentang pentingnya kepedulian terhadap lingkungan.



BAB V

PENUTUP

Guna melengkapi tulisan ini maka penulis pada tulisan selanjutnya memberikan kesimpulan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan terdahulu dan merekomendasikan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sejak tahun 2012 Pemerintah Kota Malang telah menyelenggarakan Program Pemberdayaan Masyarakat dengan sasaran utamanya adalah masyarakat Kelurahan di kota Malang. Dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan prakarsa dan swadaya masyarakat kota untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah kota dan menjalin hubungan yang harmonis antar masyarakat dengan pemerintah daerah.

Kelurahan Dinoyo sebagai salah satu kelurahan yang ikut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat memiliki dinamika masyarakat yang sangat majemuk. Masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana lingkungan dengan membentuk kelompok-kelompok masyarakat / Pokmas yang nantinya akan diberikan kewenangan untuk melaksanakan pembangunan di wilayah mereka masing-masing.

Program Pemberdayaan Masyarakat yang diadakan di kelurahan Dinoyo khususnya dalam pembangunan sarana dan prasarana lingkungan yang dilaksanakan di tahun 2012 memfokuskan pada pembangunan pavingisasi dan pembangunan gorong-gorong. Selain itu, upah kerja juga akan diberikan kepada warga yang sudah ikut berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan, hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian warga.

2. Dari hasil penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian yang telah dibahas, terdapat 4 langkah dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo, yaitu Tahap Sosialisasi, Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, serta Tahap Pengawasan. Dalam melaksanakan keempat tahap tersebut aparaturnya kelurahan dan LPMK selalu melibatkan masyarakat dalam mengambil setiap keputusan yang akan diambil.
3. Pada fokus penelitian yang kedua membahas tentang pembangunan yang telah dilaksanakan di kelurahan Dinoyo. Pada Program Pemberdayaan Masyarakat tahun 2012 pembangunan difokuskan pada pavingisasi dan pembangunan gorong-gorong. Terdapat 8 Pokmas yang bertanggung jawab mengerjakan pembangunan pavingisasi, dan ada 1 Pokmas yang bertanggung jawab mengerjakan pembangunan gorong-gorong. Setiap Pokmas diberikan anggaran dana yang tidak sama, tergantung pengajuan awal saat dilaksanakan rapat Musrenbangkel. Ketentuan pemberian anggaran untuk tiap-tiap Pokmas dilihat dari volume / luas wilayah yang

akan dibangun, banyaknya jumlah pekerja dan total bahan material yang digunakan.

Dari kesembilan program yang dilaksanakan oleh 9 Pokmas tersebut terlihat menunjukkan keberhasilan. Warga di kelurahan Dinoyo sangat antusias untuk turut serta dalam pembangunan dan mereka menginginkan adanya pembangunan berkelanjutan agar lingkungan tempat tinggal mereka menjadi lebih bersih, terawat dan mereka dapat meningkatkan perekonomian dengan adanya pemberian upah kerja.

4. Pada fokus penelitian yang terakhir penulis menjabarkan tentang faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo. Faktor yang mendukung pelaksanaan Program Pemberdayaan ini adalah seluruh pihak baik aparatur kelurahan, LPMK, dan masyarakat sangat mendukung dan aktif berpartisipasi dalam seluruh kegiatan, mulai dari pelaksanaan rapat Musrenbangkel, pembentukan Pokmas, Pelaksanaan pembangunan oleh masing-masing Pokmas sampai pada tahap pengawasan dan pengevaluasian yang semuanya merupakan hasil kerjasama yang baik dari masing-masing pihak.

Sedangkan faktor yang menghambat dalam Program Pemberdayaan ini adalah masih ada masyarakat yang belum memahami tentang pembentukan kelompok-kelompok Masyarakat. Hal tersebut membuatnya sulit berbaur dengan sesama anggota Pokmas dan mengakibatkan komunikasi dalam bekerja menjadi terganggu. Selain itu,

kurangnya antusiasme dari generasi muda juga menjadi penghambat dalam perjalanan Program Pemberdayaan Masyarakat. Kebanyakan anak muda merasa gengsi dan malu bila disuruh mengerjakan pekerjaan kuli, padahal dengan ikut berpartisipasi dalam pembangunan maka mereka akan mendapat upah kerja yang dapat membantu perekonomian keluarga.

B. Saran

1. Dalam tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Dinoyo sebaiknya lebih dimaksimalkan lagi terutama pada tahap sosialisasi karena nantinya tahap sosialisasi akan menentukan keberhasilan tahapan yang lainnya.
2. Kedua kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada Program Pemberdayaan Masyarakat yaitu pembangunan pavingisasi dan pembangunan gorong-gorong yang dilaksanakan di wilayah kelurahan Dinoyo memang sudah berjalan dengan baik, namun pihak panitia penyelenggara seharusnya lebih mengorganisir pekerja, sehingga tidak ada warga yang bekerja di 2 tempat. Dengan memperhatikan faktor-faktor penghambat dan juga faktor pendukung bisa dijadikan masukan untuk dapat memaksimalkan Program Pemberdayaan Masyarakat di tahun-tahun selanjutnya.
3. Untuk pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat kedepannya, diharapkan adanya program berkelanjutan yang lebih mengarah pada peningkatan perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Lukmas. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Budihardjo, Eko. 1992. *Percikan Masalah Arsitektur Perumahan Perkotaan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Budihardjo, Eko. 1993. *Kota Berwawasan Lingkungan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Catanese, Anthony J. 1992. *Perencanaan Kota*. Jakarta: Erlangga.
- Cokroamidjojo, Bintoro. 1980. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Daldjoeni, N. 1997. *Seluk Beluk Masyarakat Kota, Pusparagam Sosiologi Kta dan Ekologi Sosial, Cetakan Kelima*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Grigg, Neil. 1988. *Infrastructure Engineering and Management*, John Wiley & Sons.
- Jayadinata, Johara T. 1992. *Tata Guna dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: ITB.
- Jayadinata, Johara T. 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: ITB Bandung.
- Kodoatie, Robert J. 2003. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Semarang: Pustaka Pelajar.
- Kodoatie, Robert J. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Komarudin. 1997. *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*. Jakarta: Yayasan Realestat Indonesia PT Rakasindo.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Trilaksono. 2007. *Teori Administrasi Publik, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang: FIA UB.

- Numandi, Achmad. 1999. *Manajemen Perkotaan*. Yogyakarta: Lingkaran Bangsa.
- Rukmana DW Nana, Ir, Dr Florian Steinberg, Ir Robert Vander Hoff. 1993. *Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan*. Jakarta: LP3ES PT Pustaka.
- Siagian Sondang P. 1985. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Slamet, Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sukarjo. 2006. *Kumpulan Materi Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Jurusan Teknologi Pembelajaran, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat Dan JPS*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sutoro, Eko (ed). 2005. *Pemberdayaan Kaum Marginal*. Yogyakarta: APMD Press.
- Soekartawi. 1990. *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali.
- Suripin. 2004. *Sistem Drainase Perkotaan Yang Berkelanjutan*. Yogyakarta: Andi.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1991. *Pengantar Adnistrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo.

Perundang-undangan:

- Perda Kota Malang Nomor 13 tahun 2010 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman.

Internet:

- Prediksi Pertumbuhan Penduduk Perkotaan di Indonesia Diakses Pada Tanggal 12 Maret 2013 dari <http://www.datastatistik-indonesia.com>
- Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Diakses Pada Tanggal 16 Maret 2013 dari <http://bapemas.jatimprov.go.id>
- Tujuan dan Sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Diakses Tanggal 12 Maret 2013 dari <http://bpm.malangkab.go.id>

Pavingisasi di RW I Kelurahan Dinoyo



Pavingisasi di RW VII Kelurahan Dinoyo



Pembangunan Gorong-gorong di RW IV Kelurahan Dinoyo

